

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PULAU KOMODO PASCA
PEMBATASAN ZONA WILAYAH PERAIRAN TAMAN NASIONAL
KOMODO DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

DI SUSUN OLEH

IRFAN

105640119211



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawa

Nama Mahasiswa : IRFAN

Nomor Stambuk : 105640119211

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2018

Yang menyatakan,



Irfan.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Pulau Komodo Pasca Pembatasan
Zona Wilayah Perairan Taman Nasional Komodo.

Nama Mahasiswa : IRFAN

No. Stambuk : 105640119211

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar

Makassar, Agustus, 2018

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II

Hamdan, S.IP, M.Si

Dekan Fisipol Unismuh
Makassar



Dr. Ihyani Malik S.Sos. M.Si

Ketua Jurusan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penilai Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan / Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Bulan 08 Tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Drs, H. Mappigau Samma, M.Si
3. Dr. Sarifuddin Jurdi, M.Si
4. Handam, S.Ip, M.Si


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAK

Irfan. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Pulau Komodo Pasca Pembatasan Zona Wilayah Perairan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.* Pembimbing I, Bapak. Dr. H. Lukman Hakim. M.Si. dan Pembimbing II. Bapak. Hamdan, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan masyarakat pulau komodo pasca pembatasan zona wilayah perairan taman nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat pulau Komodo pasca pembatasan zona wilayah perairan taman nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat ini berlangsung dengan cara Balai Taman Nasional Komodo bersama Pemerintah Desa Komodo memberikan bantuan modal, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat pulau komodo dalam pembuatan patung komodo, souvenir dan baju bergambar komodo. Sedangkan dampak dari pemberdayaan masyarakat pulau Komodo pasca pembatasan zona wilayah perairan taman nasional komodo yaitu, masyarakat lebih memahami sumberdaya yang ada di lingkungannya serta menjadikannya sebagai identitas dan kearifan lokal yang punya nilai jual.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, pemberdayaan, Zona taman nasional

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan ramat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pulau Komodo Pasca Pembatasan Zona Wilayah Perairan Taman Nasional Komodo” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si sebagai pembimbing I dan Pak Handam, S.IP, M.Si, sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do’a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Rahman Rahim M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Si sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Handam, S.IP, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Komodo.
8. Kepada sanak keluarga terkhusus kepada Orang Tua Tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi.

9. Dan terakhir kepada rekan-rekanku yang selalu memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian studi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan tertama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, Agustus, 2018

Penulis

Irfan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENERIMAAN TIM	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian dan Kerangka Teori	7
1. Pengetian Pemberdayaan	7
2. Konsep Pemberdayaan	9
3. Tujuan Pemberdayaan	11
4. Pemberdayaan Ekonomi.	12

5. Pengertian Masyarakat	15
6. Masyarakat Kepulauan	15
7. Taman Nasional dan Kawasan Konservasi	18
8. Tujuan dan Manfaat Zona pada Taman Nasional	21
9. Keriteria Zonasi	22
B. Pemberdayaan Masyarakat dalam Zona dan Kawasan Konservasi	24
1. Masyarakat dalam zona taman nasional dan kawasan Konservasi	24
2. Upaya Pemerintah dalam Konteks Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang ada di dalam Kawasan Konservasi	27
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
C. Teknik Pengumpulan	49
D. Tipe Penelitian	40
E. Informan	41
F. Teknik Analisis Data	41
G. Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Keadaan Geografis dan Demografis	43
1. Geografis	43
2. Demografi	46
B. Hasil dan Pembahasan	48
1. Pemberdayaan Masyarakat Komodo pasca Pembatasan Zona Wilayah Perairan Taman Nasional Komodo	48
a. Taman Nasional Komodo dan Kawasan Konservasi	48
b. Masyarakat dalam Zona Taman Nasional Komodo	51
c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Komodo	58
d. Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Komodo	63
e. Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Pulau Komodo	69
f. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Desa Komodo	74
g. Faktor pendukung dan Penghambat Pemberdayaan	78
BAB V KESIMPULAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
Daftar Pustaka	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

“Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” demikian dinyatakan dalam Undang-Undang dasar 1945, yang kemudian dapat dipahami secara mendasar bahwa salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun dengan menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik, pemerintah akan banyak menemui kesulitan dan juga hambatan dalam mensejahterakan rakyat mengingat heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat berbeda-beda. Maka desentralisasi merupakan keniscayaan.

Otonomi daerah sebagai roh dari asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya hadir untuk mewujudkan tujuan utama otonomi daerah sebagaimana pertimbangan dari pembentukan Undang-Undang otonomi daerah itu sendiri adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Hidjaz, 2010). Dengan kata lain pemerintah daerah memiliki otoritas dalam mengatur,

memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan melihat potensi kekayaan alam dan budaya, pemerintah kemudian berinisiatif melahirkan berbagai kebijakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Negara dan untuk kesejahteraan masyarakat, tiap-tiap pemerintah daerah mulai mendeteksi kelebihan dalam hal sumberdaya di daerahnya, dan belakangan banyak daerah yang tengah gencar mempromosikan tempat pariwisatanya masing-masing, dan pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendulang devisa Negara di tengah-tengah menurunnya ekspor Indonesia akibat lesunya perdagangan dunia.

Langkah pemerintah dalam menggenjot pembangunan industri pariwisata serta memprivatisasi ruang-ruang yang punya daya tarik dan nilai jual dianggap menjadi strategi yang tepat, namun oleh beberapa kalangan justru menilai bahwa pembangunan industri pariwisata dan privatisasi ruang masyarakat yang menjamur dan kian tak terbendung justru di takutkan akan memberikan dampak buruk pada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan yang demikian justru harus di pahami dan ditunjukan lebih dari sekedar peningkatan kemakmuran manusia, secara material dan finansial (Suharto, 2014). Pembangunan harus di pandang sebagai proses multi dimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh, pendekatan pembangunan harus memperhatikan aspek aspek sosial, maka pendekatan sosial perlu di terapkan bersamaan dengan pendekatan ekonomi dalam strategi pembangunan.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, semenjak komodo menjadi salah satu situs warisan dunia dan sebagai cagar manusia dan Biosfer oleh UNESCO (https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Komodo), sekaligus juga menjadi awal terbentuknya Taman Nasional Komodo (TNK). Manggarai Barat kemudian didapuk menjadi daerah pariwisata dan menjadi salah satu destinasi wajib bagi wisatawan, dan semenjak itulah banyak gejolak yang kemudian bermunculan di tengah-tengah masyarakat, pembangunan gedung-gedung hotel dimana-mana, dan beberapa pulau yang dianggap strategis juga di kontrakan dan bahkan di jual kepada investor untuk membangun resort atau hunian bagi para wisatawan yang datang berkunjung untuk melihat langsung hewan langka ini, maupun hanya sekedar menikmati suguhan alam dan biota laut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor. 28. Tahun, 2011. Pengelolaan kawasan di dalam taman nasional didasarkan pada zonasi. Maka berhubungan dengan tata letak taman nasional Komodo berada di pulau Komodo dan sekitarnya dengan luas wilayah Taman Nasional 1.817 kilometer persegi, disana terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan Asia dan Australia yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung dan, 37 spesies reptilian, bersama dengan komodo setidaknya ada 25 spesies hewan darat dan burung yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Sementara kepulauan dalam Taman Nasional Komodo memiliki luas lebih dari 603 kilometer persegi (60,300 ha) dengan luas taman lautnya sekitar 1.214 kilometer persegi (121,400 ha) terdiri dari beberapa pulau antara lain, pulau Komodo, pulau Rinca, pulau Padar, pulau Gili Motang dan Nusa Kode, dengan

total jumlah penduduk 4.000 jiwa lebih (Arnaz, 2004). Hal ini mengakibatkan ruang gerak yang terbatas bagi masyarakat pulau Komodo yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan tentunya dianggap merugikan masyarakat setempat dan berdampak pada penghasilan nelayan yang semakin berkurang akibat adanya zonasi dan larangan untuk menangkap ikan di kawasan perairan Taman Nasional Komodo. Larangan ini tentunya bukan tanpa alasan, demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, demi menjaga keberlangsungan hidup komodo sebagai hewan yang terancam punah dan juga demi kelestarian ekosistem biota laut maka, aktifitas menangkap ikan di kawasan ini harus di hentikan, penghentian aktifitas menangkap ikan sekaligus menjadi awal lesuhnya perekonomian dan aktifitas melaut bagi warga pulau Komodo.

Akibat kebutuhan investasi yang jauh lebih besar ini mengakibatkan kelompok masyarakat di pulau Komodo cenderung tertinggal jauh dari kelompok masyarakat yang ada di daratan yang secara langsung dapat merasakan dan menikmati hasil dari padap embangunan daerah yang di kenal dengan wisata baharinya ini, bagi kelompok ini misalnya bisa mendapatkan penghasilan dengan menyediakan transportasi laut atau penginapan bagi wisatawan sebelum atau bila ingin berkunjung di pulau-pulau tertentu, kecendrungan ini pada giliranya melahirkan keterasingan kelompok yang tidak hanya dapat di lihat dari tingkat pendapatan yang di miliki, namun juga pada kualitas hidup dan pola aktivitas ekonomi masyarakat pulau Komodo.

Sejalan dengan itu untuk mengurangi tekanan di tengah himpitan ekonomi maka masyarakat lokal dapat di berdayakan dalam kegiatan ekowisata berbasis

masyarakat, mengingat masih banyak potensi sumberdaya yang bisa di kelola melalui pemberdayaan ini yang juga berpotensi menjadi daya tarik wisatawan. Selain dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian perekonomian masyarakat lokal, pemberdayaan melalui ekowisata ini juga dapat memberikan keuntungan bagi Taman Nasional.

Atas dasar adanya hubungan yang bersifat ekonomi dan saling membutuhkan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini TNK yaitu adanya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya yang berada di kawasan TNK, untuk itulah penelitian ini di beri judul **“Pemberdayaan Masyarakat di pulau Komodo pasca pembatasan zona wilayah perairan Taman Nasional Komodo”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di indentifikasikan sebagai berikut;

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo ini berlangsung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo ini berlangsung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat yang ada dalam kawasan Taman Nasional Komodo dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini di harapkan mampu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu pemberdayaan, khususnya tentang pemberdayaan masyarakat di kepulauan.
2. Bagi pemerintah dapat di gunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan sosial ekonomi yang ada di kepulauan khususnya masyarakat kepulauan yang wilayahnya masuk dalam zona perairan Taman Nasional Komodo (TNK)
3. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan manfaat agar terjadi suatu peningkatan bagi kesejahteraan seluruh komponen masyarakat dengan melibatkan peran dalam setiap penyelenggaraan pemberdayaan di TNK.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Kerangka Teori

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kemampuan. Ali,(2014). Pembangunan dan pemberdayaan diartikan sebagai usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA) hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok, maupun individu. (Zunadi, Usman, Suyoto. 2004).

Di Indonesia pemberdayaan yang berlangsung saat ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pemberdayaan juga merupakan suatu pembangunan sosial di suatu daerah, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam pemecahan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pendekatan pemberdayaan bertujuan agar masyarakat tampil sebagai pelaku utama bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya sendiri. Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang dimilikinya. Sehingga pemberdayaan (*empowerment*) merupakan *central theme* atau jiwa partisipatif yang sifatnya aktif dan kreatif. Mardijono, (2008). Menurut Hardiman dan

Midgley dalam Suharto, (2014) model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marginal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan tersebut di capai melalui:

1. Menumbuhkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja.
2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Upaya pertama mengarah kepada penciptaan peluang bagi kelompok yang lemah secara ekonomi. Upaya kedua terfokus pada peningkatan kemampuan mereka dalam merebut dan memanfaatkan peluang yang telah di ciptakan tadi. Pada dasarnya pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal, namun demikian, *McArdle* mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan (Hikmat,2010).

2. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro, Eko. 2002). Selanjutnya terdapat tujuan dari pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto,2005).

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tentukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat, pentingnya pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya bereperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan, dan pemberdayaan, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa di lepaskan dan di serahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan.

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, actor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komperhensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro, Eko. 2002).

Pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran di dalam kehidupan masyarakat, Prijono dan Pranaka, dalam Labaran. Hakim dan Hardi, (2014).

Menurut Labolo (2011), fungsi pemerintah terbagi atas beberapa bagian; a) Fungsi pelayanan, pelayanan di kelompokkan menjadi pelayanan sipil, dan jasa publik; b) Fungsi Pengaturan, yaitu perumusan dan menegakkan peratuaran-peraturan bagi pemerintah daerah khususnya untuk mengatur kegiatan-kegiatan khusus misalnya, tata guna tanah, standar bangunan,hiburan, pelayanan publik dan sebagainya. c) Fungsi Pembangunan, pemerintah regional mungkin terlibat langsung dalam bentuk-bentuk ekonomi, seperti pengoprasian pabrik-pabrik, perkebunan, kehutanan dan usaha perdagangan.

3. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang di alami oleh masyarakat yang di tandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang di hadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Terjadinya keberadaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif, dan psikomotorik) akan dapat memeberikan kontribusi pada terciptanya kemnadirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang di lengkapi dengan kecakapan dan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan prilaku sadar akan kebutuhan tersebut. Teguh dalam Ali, (2014)

Menurut Zunadi ddk, (2010), mengartikan pemberdayaan dalam konteks masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat perubahan prilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut, terlihat ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat.

Pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu di hubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses kemandirian. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk pengembangan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasi. (Anwar, 2007).

4. Pemberdayaan Ekonomi

Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu; Produksi, distribusi, dan konsumsi. Andini, (2015) mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Produksi, distribusi dan konsumsi merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik.

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Kurniawati (2015) Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam kedudukan nasional.

Membangun ekonomi rakyat harus berarti meningkatkan kemampuan dengan cara mengembangkan dan memberdayakannya. Upaya menggerakkan sumberdaya untuk mengembangkan potensi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang ada di sekitar. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terdapat pilihan kebijaksanaan dalam beberapa langkah strategi seperti yang di kemukakan oleh Sumodiningrat yaitu;

- a. berikan peluang atas akses yang lebih besar pada akses produksi, pendapatan. Sehingga, mampu meningkatkan produksi, pendapatan, dan menciptakan tabungan yang dapat meningkatkan pemupukan modal secara berkesinambungan.
- b. Memperkuat potensi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat yang di bantu dengan prasarana dan sarana penghubung yang mampu memperlancar

pemasaran produksi. Membangun kesetiaan dan rasa kesamaan sehingga menciptakan rasa percaya diri dan harga diri dalam menghadapi kebutuhan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan tanggung jawab, bahwa kemenangan dalam pergulutan perdagangan bebas tidak akan tercapai tanpa adanya rasa kebersamaan dan kesatuan.

- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan dan pelatihan, kesehatan berperan besar dalam menentukan produktivitas.
- d. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat. Proses industrialisasi mengarah ke daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya argo industri.
- e. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
- f. Pemerataan pembangunan antar daerah karena perekonomian yang tersebar diseluruh penjuru tanah air.

Menggerakkan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, akan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga SDA maupun SDM yang ada disekitar masyarakat dapat di tingkatkan produktivitasnya.

5. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama dimana mereka berdiam pada daerah yang sama, yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat kebiasaan dan aktivitas yang sama, Syani,(2012)

Definisi lain dari masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat, istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat cirri yaitu; 1).Interaksi antara warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3). Kontinuitas waktu, 4). Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009).

Menurut Durkheim dalam (Mulyono 2013) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan angota-angotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup, adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
- b) Bercampur untuk waktu yang lama;
- c) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan;
- d) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

6. Masyarakat Kepulauan

Masyarakat dan kepulauan atau pulau, dua kata yang mempunyai arti tersendiri, untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus di artikan

terlebih dahulu kata per-kata. Misalnya, Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku, serta kebiasaan-kebiasaan manusia, Iver dan Page dalam (Soekanto 2006).

Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Koentjaraningrat dalam Ali, (2010)

Sementara Pulau adalah sebidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang di kelilingi air. Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai pulau; a). Memiliki lahan daratan; b). Terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi; c). Di kelilingi oleh air, baik air asin, maupun air tawar. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pulau>), Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014). Sementara menurut Rahmanto, (2013), masyarakat kepulauan atau pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya.

Pandangan tentang pengertian dua kata diatas yaitu Masyarakat dan Pulau untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa sekumpulan manusia yang hidup berkelompok dengan dasar kekeluargaan yang tinggal di sebuah wilayah daratan yang dikelilingi oleh air. Umumnya masyarakat kepulauan memiliki dua orientasi mata pencaharian yakni sebagai nelayan dan petani, masyarakat pesisir di samping sebagai nelayan mereka juga adalah petani ladang yang melakukan usaha pertanian tanaman umur pendek, seperti ubi kayu/jalar, jagung, padi/padi gogo, kacang-kacangan dan berbagai jenis sayuran dan lainnya, juga tanaman umur panjang seperti kelapa, cengkeh, pala dan berbagai jenis tanaman buah-buahan(<http://maxmaswekan.blogspot.sg/2012/02/sosiologikepulauan.html>).

Sejak otonomi daerah di berlakukan, salah satu isu prioritas pembangunan yang mendesak untuk ditangani adalah persoalan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepulauan, paling tidak ada tiga alasan mengapa masyarakat kepulauan perlu memperoleh perhatian khusus karena wilayah kepulauan pada umumnya di tenggarai menjadi salah satu kantong kemiskinan yang paling menderita akibat tekanan situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kendati mungkin masyarakat kepulauan telah terbiasa hidup secara subsisten dan telah terlatih menghadapi hidup yang serba terbatas, tetapi tekanan kemiskinan yang bertubi-tubi tentu menyebabkan peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi makin tipis bahkan nyaris tidak ada.

Kedua, karna kepulauan adalah wilayah yang tengah menghadapi polarisasi paling mencolok, baik secara fisik maupun sosial, dengan posisi geografis yang relatif terisolir, wilayah kepulauan bukan saja jauh dari

kepentingan dan sumber-sumber produktif dipusat-pusat kekuasaan. Ketiga, karena SDM kepulauan umumnya masih jauh tertinggal dan tidak mustahil akan mengalami degradasi kualitas kehidupan jika tidak segera dilakukan langkah-langkah intervensi.

Sebagai sebuah komunitas, kehidupan masyarakat kepulauan bukan saja relatif terisolasi, tetapi secara sosial juga tertinggal dibandingkan daerah disekitarnya mobilitas vertikal masyarakat berjalan lambat, bersifat tradisional, dan pilihan hidup yang tersedia umumnya sangat terbatas, terlebih mereka yang hidup ditengah-tengah pembangunan yang sedemikian pesat. Pelaksanaan pembangunan masyarakat desa kepulauan tampak berlangsung tak seirama dengan pembangunan masyarakat desa lainnya, terutama bila dibandingkan dengan pembangunan di perkotaan.

Masalah dan kendala yang dihadapi sangat bervariasi, diantaranya: kondisi ekonomi masyarakat nelayan pada umumnya miskin, tertinggal dalam penguasaan teknologi dan informasi, terbatasnya sarana dan prasarana, pola mata pencaharian yang masih tergantung musim, tingkat pelayanan kesehatan yang terbatas, pola perkampungan menetap dan khas, pola produksi-distribusi-konsumsi yang relatif masih sederhana.

7. Taman Nasional dan Kawasan Konservasi

Taman nasional dan kawasan Konservasi merupakan aset umum yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Konservasi menurut Asmin (2004). Adalah pengelolaan penggunaan manusia atas biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat

berkelanjutan terbesar pada generasi sekarang, sementara memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masa depan.

Menurut Kinnon dalam Moeliono (2010), bahwa cagar alam merupakan kawasan untuk melindungi alam dan menjaga proses alami dalam kondisi yang tidak terganggu dengan maksud untuk memperoleh contoh-contoh ekologis yang mewakili lingkungan alami sehingga dapat dimanfaatkan bagi keperluan studi ilmiah, pemanfaatan lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya plasma nutfah dalam keadaan dinamis dan berevolusi. Berdasarkan, Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2011. Tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menjelaskan bahwa kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Suatu kawasan di tunjuk sebagai kawasan taman nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
- 2) Memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
- 3) Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- 4) Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk di kembangkan sebagai pariwisata alam; dan

- 5) Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk di sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya dan ekosistemnya dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri. Pemanfaatan Tamana Nasional untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian dilakukan pada seluruh zona dan dengan izin Kepala Balai Taman Nasional. Untuk tujuan pendidikan dilakukan pada zona rimba, zona pemanfaatan wisata dan zona pemanfaatan lainnya. Sedangkan untuk tujuan pariwisata alam dilakukan di zona pemanfaatan intensif, dan secara terbatas pada zona rimba. Guna mendukung kepentingan pemanfaatan oleh masyarakat setempat akan hasil hutan non kayu di kembangkan adanya zona pemanfaatan tradisional dan zona pemanfaatan khusus (Riyanto,2005).

Sejak tahun 1920, Indonesia telah menerapkan konsep pengelolaan kawasan lindung untuk tujuan konservasi alam, hal ini ditandai dengan didirikannya kawasan konservasi (KK) pertama di Indonesia yaitu cagar alam Pancoran Mas di Depok, Jawa Barat pengembangan dan praktik kawasan konservasi di perluas di lokasi lokasi lain dan di dasarkan pada konsep konservasi alam klasik yang melihat perlunya prngawetan dan perlindungan sumberdaya alam dan spesies-spesies organisme yang terancam punah oleh kegiatan manusia. Konsep ini tidak mengenal pentingnya pengelolaan lokal dan praktik praktik

pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal, oleh karena itu masyarakat lokal dengan sengaja di keluarkan dari KK.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengandalkan konservasi pada tiga pilar, yaitu pengawetan (preservasi), perlindungan (proteksi), dan pemanfaatan. Melalui tiga pilar itu ekspansi dan pendirian KK dilakukan. Ekspansi pertama dilakukan pada tahun 1980 bertepatan dengan pengumuman Strategi pelestarian dunia (*world conservation strategy*), didirikanlah lima Taman Nasional (TN) yang pertama di Indonesia yaitu TN Ujung Kulon, TN Gunung Gede-Pangrango, Taman Nasional Baluran, TN Gunung Leuser dan TN Komodo (Moeliono, ddk, 2010).

8. Tujuan dan Manfaat zona pada Taman Nasional.

Menurut Bengen (2002). Agar supaya ekosistem dan sumberdaya dapat berperan secara optimal dan berkelanjutan maka di perlukan upaya-upaya perlindungan dari berbagai ancaman degradasi yang dapat di timbulkan dari berbagai aktivitas pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Peraturan Pemerintah. Nomor.28 Tahun 2011. Bahwa Taman Nasional di kelola dengan system zonasi, maka pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional dilakukan berdasarkan penataan zonasi dan di laksanakan melalui; (1) perlindungan system penyangga kehidupan: (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, beserta ekosistemnya: dan (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor .56/Menhut-II/2006 tentang panduan Zonasi Taman Nasional di jelaskan bahwa Zonasi TN adalah suatu

proses pengaturan ruang dalam TN dalam zona-zona yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisa data, penyusunan draf rencana zonasi, konsultasi publik, perencanaan, tata batas dan penetapan dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.56/Menhut-II/2006 menjelaskan bahwa yang di maksud dengan Zona TN adalah wilayah dalam kawasan TN yang di bedakan menurut fungsi dan ekologis, sosial, ekonomi dan budaya msyarakat. Tujuan zonasi adalah untuk menciptakan pola pengelolaan yang efektif dan optimal sesuai dengan kondisi dan fungsinya. Manfaat sistem zonasi di dasarkan pada kondisi di lapangan, tujuan pengelolaan masing-masing zona dan proses penetapan yang harus melibatkan pemangku kepentingan yang lain.

9. Kriteria Zonasi

Seperti yang tertuang dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.56/Menhut-II/2006 tentang pedoman Zonasi yang sudah di tetapkan, yaitu;

1) Zona Inti

Kriteria penetapan zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum di ganggu oleh manusia, mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum di ganggu oleh manusia,

mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologi secara alami, mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi, mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah, merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik dan merupakan tempat aktivitas satwa migran.

2) Zona Pemanfaatan

Kriteria dalam penetapan zona pemanfaatan adalah mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu atau serta formasi geologinya yang indah dan unik mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam, kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan dan tidak berbatasan langsung dengan zona inti.

3) Zona Tradisional

Zona tradisional adalah bagian dari Taman Nasional yang di tetapkan untuk kepentingan, pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumberdaya alam.

4) Zona Rehabilitasi Alam

Zona Rehabilitasi adalah bagian dari Taman Nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.

5) Zona Religi, Budaya dan Sejarah

Adalah bagian dari Taman Nasional yang di dalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.

6) Zona Khusus

Zona Khusus adalah bagian dari Taman Nasional karena kondisi yang tidak dapat di hindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupan yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

B. Pemberdayaan Masyarakat dalam zona Taman Nasional dan Kawasan Konservasi

1. Masyarakat dalam Zona Taman Nasional dan Kawasan Konservasi

Pengelolaan kawasan Taman Nasional, praktis dan pemerhati Konservasi di Indonesia telah menyadari dan merasakan bahwa pengelolaan Taman Nasional di hampir semua daerah menghadapi tantangan besar, yakni bagaimana mewujudkan pola pengelolaan yang menjamin tercapainya kepentingan konservasi dan sekaligus memberi sumbangsih kepada kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di dalam dan di sekitar Taman Nasional dan kawasan Konservasi, namun demikian seperti yang di ungkapkan Mulyana ddk, (2010),

bahwa konservasi di Indonesia sedang mengalami kebuntuan, semua kawasan konservasi yang merupakan aset umum (*public good*) dan di kelola pemerintah untuk kepentingan umum telah mengalami kerusakan, pengurangan luas atau di perebutkan oleh berbagai pihak yang ingin memanfaatkan kawasan tersebut untuk kepentingan lain, khususnya Taman Nasional tidak ada yang tidak mengalami tekanan dan tidak ada yang tanpa keberadaan masyarakat, akar masalahnya kompleks, kebanyakan Taman Nasional baru di tunjuk dan belum dikukuhkan, ditetapkan tanpa konsultasi dengan pihak lain dan tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat di kawasan tersebut.

Konservasi di lihat sebagai hambatan terhadap pembangunan sehingga kurang di dukung bahkan di lawan oleh banyak pihak, akibatnya konservasi tidak berjalan dengan baik, sementara di dalam dan sekitar Taman Nasional sudah terlanjur ada Masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupan mereka dalam kawasan tersebut. Pola pikir pemerintah yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dalam menyikapi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional adalah menempatkan masyarakat tersebut sebagai objek pengelolaan yang menjadi bagian dari potensi pengembangan wisata, bahkan terkadang ditempatkan sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan konservasi. Tradisi pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan taman nasional oleh masyarakat adat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya seringkali dinilai sebagai tekanan ataupun ancaman terhadap keutuhan ekologis kawasan hutan milik pemerintah.

Seperti yang telah di sebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut II/2006 tentang pedoman zona Taman Nasional bahwa masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Konservasi dan Taman Nasional masuk ke dalam kriteria zona khusus, maka hampir pasti dikatakan keberlangsungan hidup masyarakat dalam kawasan Taman Nasional bergantung pula pada sumberdaya alam yang ada di sekitar Taman Nasional itu sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara kawasan taman nasional dan wilayah yang di diami masyarakat, sehingga muncul konflik ruang dan sumber daya alam.

Dunia internasional telah menyadari adanya kesalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Kongres Taman Sedunia (*world park congress, WPC*) tahun 2003 di Durban menghasilkan deklarasi yang menyatakan bahwa keberadaan masyarakat yang sudah lebih dahulu mengelola wilayah tersebut perlu untuk dihormati hak-haknya. Prinsip tanpa paksaan dan pemberitahuan diawal (*free prior informed consent, FPIC*) terhadap program-program yang berkenaan dengan kehidupan dan sumber kehidupan masyarakat adat harus dijalankan. Selain itu, kawasan konservasi yang sudah maupun yang akan dibentuk harus dibangun dan dikelola dengan menghormati hak-hak masyarakat, mengadopsi sistem adat, dan membayar restitusi dari penggunaan sumber daya alam yang digunakan.

Kebijakan pembentukan Taman Nasional diawali dengan klaim kawasan sebagai hak milik negara (*state property right*) sehingga pemerintah menetapkan lokasi-lokasi yang dinilai memenuhi kriteria pembentukannya secara *top-down*. Li

(2001) menyatakan bahwa tidak adanya batas-batas yang jelas terhadap kategori masyarakat adat telah mempersempit dan membatasi wilayah-wilayah yang didiami masyarakat adat, serta kepentingan nasional telah mengalahkan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Di lain pihak masyarakat adat mengelola kawasan yang sama dengan kearifan tradisional yang bersifat lokalitas yang merupakan hasil adaptasi kehidupan terhadap kondisi lingkungan. Rahmawati.(2008) menyatakan bahwa pertarungan pengetahuan masyarakat lokal dan pengelola taman nasional telah menyebabkan teralienasinya pengetahuan lokal yang telah dikembangkan secara turun temurun dan mengatur relasi masyarakat dengan alam (hutan).

2. Upaya Pemerintah dalam konteks Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang ada di dalam Kawasan Konservasi

Salah satu arah pembangunan nasional adalah membangun bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Kebijakan ideal tersebut dapat dicapai dengan memobilisasi segenap potensi dan sumberdaya masyarakat yang ada. Bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan merupakan ciri dari bangsa yang memiliki keberdayaan yang kuat. Dengan kata lain maka kebijakan sosial harus memiliki wawasan pemberdayaan masyarakat. Suharto (2014), pun demikian harapan itu bisa dirasakan oleh masyarakat dalam kawasan konservasi.

Adalah Zona khusus konsep yang penerapannya diharapkan dapat menjadi sarana mengatasi konflik masyarakat dan taman nasional. Zona khusus menyediakan ruang negosiasi terbatas yang hasilnya diharapkan berupa penetapan zona khusus dan kesepakatan mengenai pengelolaannya. Zona khusus tidak

dibayangkan sebagai penunjukan wilayah, tetapi sebagai kesepakatan mengenai lokasi dan luas, hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan, dan perjanjian kerja antara pihak-pihak. Zona khusus digagaskan pula sebagai bagian dari TN. Karena itu, tujuan utamanya adalah konservasi.

Pembangunan dan pengembangan masyarakat dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan asas konservasi. Zona khusus juga merupakan bagian dari kawasan sekitarnya, baik secara geografi, sosial ekonomi maupun budaya. Moeliono Moira, Ddk.(2010). Karena itu, pengelolaannya terkait dengan program pembangunan menyeluruh terkhusus bagi masyarakat yang berada dalam kawasan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi perlu untuk kembali ditekankan dan dioptimalkan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga gesekan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak swasta selaku pengelola Taman Nasional mampu untuk diminimalisir.

Pemerintah di Negara-Negara berkembang termasuk Indonesia telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan masyarakat, yaitu 1) pembangunan pertanian, 2). Industrialisasi pedesaan, 3). Pembangunan masyarakat desa terpadu, dan 4). Strategi pusat pertumbuhan (Usman, 2004).

Penjelasan macam-macam program sebagai berikut: Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani, juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi

negara maju. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan, pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternatif menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerjadi pedesaan. Program pembangunan masyarakat terpadu, tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri. karenanya untuk mendapatkan partisipasi masyarakat terutama pada tingkat desa harus diusahakan adanya perubahan sikap mental kearah perbaikan yang tanpa adanya tekanan, masyarakat juga harus merasa bahwa dalam pembangunan itu terdapat kebutuhan-kebutuhan mereka, partisipasi dari segenap pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pembangunan.

Partisipasi menyebabkan terjalinnya kerjasama dalam masyarakat dan kerjasama ini perlu pengkoordinasian yang baik dari pimpinan, dalam hal ini dimaksudkan agar partisipasi tersebut berdaya guna secara efektif. Koordinasi akan berjalan dengan baik apabila jalur-jalur komunikasi dalam masyarakat berjalan seimbang. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian apa yang dilaksanakan sebagai proses pembangunan adalah merupakan milik bersama yang harus di pelihara dan di pertanggung jawabkan demi kesejahteraan bersama.

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), secara umum memiliki kemiripan dimenasi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendamping eksitu.

1. Bantuan Modal .

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sector ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama.

Pertama bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi

juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

Kedua yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi *kere*. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta

membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman. Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk memperluas akses usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ke lembaga keuangan, sebenarnya sudah cukup banyak, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat(KMK-BPR), Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Trans Kawasan Timur (KKPA PIR Trans KRI), KKPA-Bagi Hasil, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM), dan masih banyak lagi lainnya. Affirmative Action untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

2. Bantuan Pembangunan.

Prasarana Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan

pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan.

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

4. Penguatan Kelembagaan.

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat

mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pada tahun 80-an ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki dampingan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar. Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefinisikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomi. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi_20091015151035_2384_0.pdf

Kita patut bergembira, karena dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh banyak pihak, mulai dari pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ini indikasi, bahwa pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, telah menjadi komitmen dari semua komponen bangsa. Untuk efektivitas dan efisiensi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Beberapahal dimaksud antara lain: (1) perlu ada kesamaan paham mengenai konsep pemberdayaan, sebab pada akhir-akhir ini berbagai program/proyek pembangunan diberi label pemberdayaan, walaupun sebenarnya justru mengingkari makna

pemberdayaan; dan (2) perlu ada koordinasi antarlembaga dan bahkan dalam lembaga dalam gerakan pemberdayaan ini, sebab ditengarai ada banyak kegiatan/proyek yang saling tumpang tindih dan mirip satu sama lain dengan nama yang berbeda.

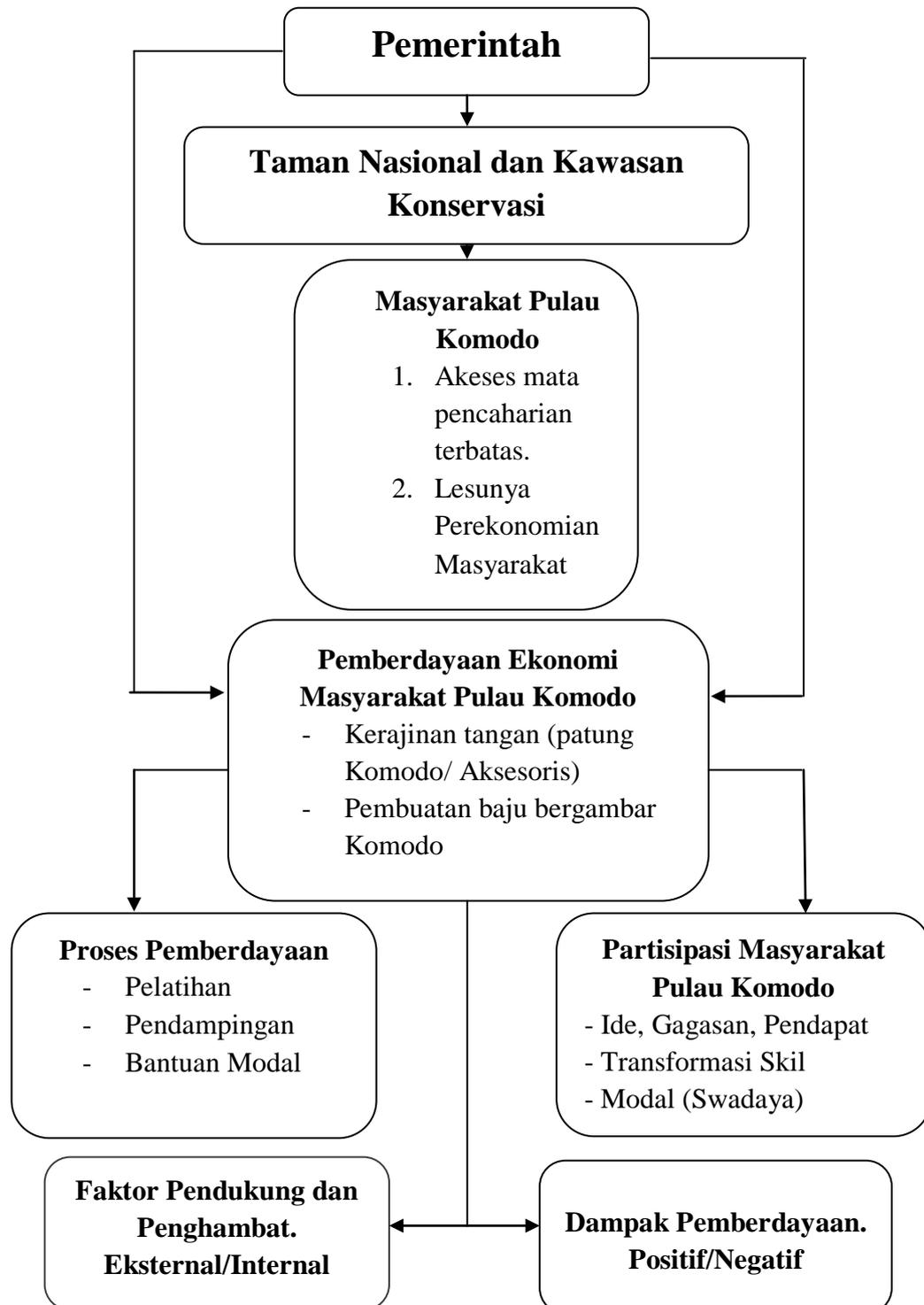
C. Kerangka pikir

Kerangka pikir yang diarahkan dalam penelitian ini adalah, bahwa masyarakat yang ada di dalam zona kawasan Taman Nasional Komodo mengalami keterbatasan akses mata pencaharian, akibat adanya penetapan kawasan konservasi yang di lindungi, sementara masyarakat kepulauan yang ada dalam zona Taman Nasional Komodo dan kawasan Konservasi, untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya hanya bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan itu sendiri, sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan misalnya, kesulitan untuk melaut akibat adanya pembatasan zona perairan Taman Nasional Komodo, demikian juga bagi sebagian masyarakat lainnya yang bertani dan bercocok tanam, adanya larangan untuk membuka lahan dengan alasan untuk melindungi hewan komodo dan memberi rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang berkunjung.

Hingga sebagian masyarakat memilih untuk meninggalkan mata pencaharian yang selama ini sudah di gelutinya. Oleh sebab itu pemerintah, membentuk kelompok pemberdayaan dengan harapan dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat yang ada di dalam kawasan Konservasi, agar dapat mandiri dan ikut aktif dalam pembangunan dan perekonomian. Kelompok pemberdayaan ini umumnya diberdayakan dengan cara

pengembangan sumber daya manusia SDM dan keterampilan seperti keterampilan dalam pembuatan patung komodo, souvenir dan baju Komodo, dengan harapan tujuan pengetahuan dan keterampilan dalam pemberdayaan ini, agar masyarakat dapat berdaya secara ekonomi. Selain itu, dalam mewujudkan tercapainya suatu pemberdayaan yang baik dan efisien maka masyarakat yang di berdayakan juga diberikan pelatihan, pendampingan serta didukung dengan adanya bantuan modal, hal ini di lakukan agar mampu menyentuh semua masyarakat dan ikut berpartisipasi baik dalam proses pelatihan maupun pendampingan yang berlangsung.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan di lakukan selama dua bulan, dan daerah penelitian ini adalah Kabupaten Manggarai Barat.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif memiliki beberapa perspektif teori yang didukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur menggunakan angka-angka, maka penelitian ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat dalam hal ini pemberdayaan masyarakat pasca pembatasan zona wilayah perairan taman nasional Komodo di kabupaten Manggarai Barat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi/daerah penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat, dalam hal ini proses dan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan yang ada di desa Komodo kabupaten Manggarai Barat.

2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan masyarakat yang di berdayakan dan atau pemerintah yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ini dalam hal ini yaitu pemerintah desa Komodo dan Balai Taman Nasional Komodo yang ada di Kabupaten Manggarai Barat-NTT, adapun wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang bersifat langsung dengan mengedepankan interaksi dan Tanya-jawab seputar pemberdayaan masyarakat desa Komodo mulai dari proses, partisipasi dan manfaat dari pemberdayaan itu sendiri.
3. Dokumentasi yaitu, cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen baik dokumen tertulis maupun hasil gambar, dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan, data yang diperoleh dari dokumen ini bias digunakan untuk melengkapi bahkan memperkuat data dari hasil wawancara dan observasi. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses dan partisipasi masyarakat desa Komodo dalam proses pemberdayaan ini

D. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan pada masing-masing variabel objek penelitian serta menarik kesimpulan mengenai apa yang hendak diperoleh dari penelitian ini. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan.

E. Informan

Informan adalah mereka yang terdiri dari pihak yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Adapun informan yang diyakini akan dapat memberikan data dan atau informasi yang tepat dan akurat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Informan Penelitian	Jabatan	Jumlah
1	Pemerintah Desa	Kepala Desa	1 orang
		Kasi Desa	1 orang
2	BTNK		2 orang
3	Masyarakat		20 orang

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis untuk menjabarkan peristiwa, kejadian, perubahan dan pengalaman yang terjadi untuk mengetahui keefektifan suatu metode. Dalam penelitian ini kegiatan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat desa

komodo pasca pembatasan zona wilayah perairan taman nasional Komodo di kabupaten Manggarai Barat, baik dari proses pemberdayaan itu sendiri sampai dengan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan itu, dengan melakukan pengumpulan data dan reduksi data.

G. Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Trianggulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Trianggulasi dengan metode berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan menggunakan metode yang berbeda. Trianggulasi dengan sumber diperoleh dari mengumpulkan data dari sumber yang berbeda, yang tersedia dilapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Geografis dan Demografi

1. Geografis

Kabupaten Manggarai Barat secara administratif merupakan bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur, terletak paling barat di pulau Flores Kabupaten Manggarai Barat merupakan wilayah administratif yang tergolong baru, melalui UU RI NO. 8 tahun 2003, menjadi wilayah otonom dengan nama Kabupaten Manggarai Barat. Sebelumnya merupakan bagian wilayah administratif Kabupaten Manggarai.

Wilayah Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari Kecamatan Komodo (termasuk pulau-pulau disekitarnya seperti pulau Komodo, Rinca, Mules, Longos, serta pulau-pulau kecil lainnya), Sano Nggoang, Lembor, Macang Pacar, Kuwus, Boleng welak dengan luas wilayah 294,746 Ha. Luas daratan adalah 2.947,50 Km² sedangkan luas wilayah lautan adalah 6.052,50 Km².

Secara geografis Kabupaten Manggarai Barat terletak diantara:

- 08⁰ 14' Lintang selatan – 09⁰00 Lintang selatan
- 119⁰.21' Bujur Timur – 120⁰20' Bujur Timur

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan Kabupaten Manggarai

Barat : berbatasan dengan Selat Sape

Utara : berbatasan dengan Laut Flores

Selatan : Berbatasan dengan laut Sawu.

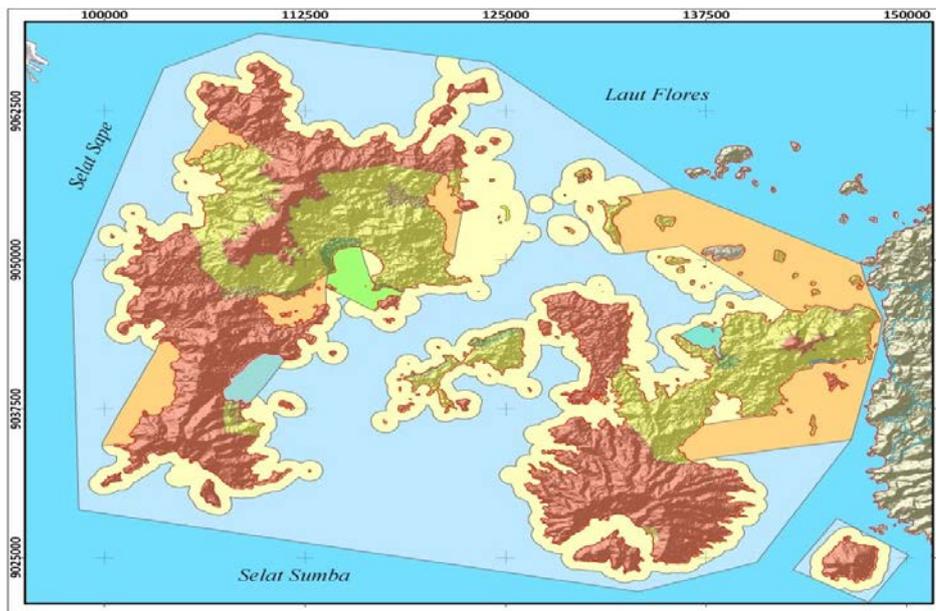
Ketinggian Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi, yakni kelas ketinggian kurang dari 100 m dpl, 100-500 m dpl, 500-1000 m dpl. Lebih dari 75% wilayah berketinggian diatas 100m dpl. Kemiringan lerengnya bervariasi antara 0-2%, 2-14%, 15-40% dan diatas 40%. Namun secara umum, wilayah bertopografi berbukit-bukit hingga pegunungan. Iklim dan curah hujan tidak merata. Besarnya curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1500 mm/tahun, sehingga secara umum iklim bertipe tropic kering/semi arid. Curah hujan tertinggi terdapat di pegunungan yang mempunyai ketinggian diatas 1000 meter diatas permukaan laut, sedangkan curah hujan pada daerah-daerah lain relatif rendah.

Kabupaten Manggarai Barat banyak terdapat sumber air, baik air tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri atas 1 (satu) danau alam (vulkanik) serta lebih dari 15 buah sungai. Dari sejumlah sungai tersebut, hanya 25% sungai yang berair sepanjang tahun. Sedangkan air danau Sano Nggoang dengan kandungan sulfur/belerang tinggi tidak dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Di Kecamatan Komodo terdapat Zona khusus yaitu Taman Nasional Komodo pada posisi antara 119° 09'00" – 119°55'00" Bujur Timur dan antara 8°20'00" – 8°53'00" Lintang Selatan. Luas total Taman Nasional Komodo 1,817 Km², termasuk 603 km² (33%) berupa daratan dan 1,214 km² (67%) perairan laut. Taman Nasional Komodo meliputi Pulau Komodo (336 km²), Rinca (211 km²), Padar (16 km²), Gili Motang (10 km²), dan Nusa Kode (7 km²). Termasuk pulau-pulau kecil yang terletak antara selat Sape di sebelah barat, selat Sumba di sebelah selatan, selat Molo di sebelah timur, dan laut Flores di utara. Zonasi Taman Nasional Komodo didasarkan pada SK Dirjen PHPA No. 74/Kpts/Dj-VI/1990 dan sesuai dengan UU No. 5/1990 tentang Konservasi sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat).

Taman Nasional Komodo berada diantara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores dan diantara selat Sape dan Laut Flores, di Kepulauan Sunda Kecil Indonesia, taman nasional ini termasuk ke dalam wilayah kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Taman nasional Komodo umumnya meliputi daerah laut dan darat: kepulauan tersebut dinyatakan sebagai taman nasional untuk melindungi komodo yang terancam punah dan lingkungannya serta keanekaragaman hayati di pulau tersebut. Taman lautnya dibentuk untuk melindungi biota laut yang sangat beragam yang terdapat disekitar pulau tersebut, termasuk yang terkaya di bumi.

Gambar 1.1. Peta pulau Komodo dan kawasan TNK



*Sumber: Arsip Balai Taman Nasional Komodo

Kepulauan di Taman Nasional Komodo umumnya masih berusia muda, merupakan pulau-pulau vulkanik yang dikelilingi lautan yang secara terus menerus berubah: muncul, terkikis, dan tenggelam kedalam laut. Bagian barat pulau komodo mungkin merupakan bagian pertama yang terbentuk dari kegiatan vulkanik di Jaman Jurasik sekitar 130 hingga 134 juta tahun yang lalu. Bagian timur pulau Komodo, Padar dan Rinca adalah bagian yang lebih muda dan barangkali muncul pada jaman Eosin kira-kira 49 juta tahun yang lalu. Kepulauan yang ada di kawasan taman nasional Komodo kebanyakan terdiri dari sejumlah

batuan vulkanik yang diapit oleh batuan berpasir, dan kesatuan batuan kapur, serpihan-serpihan pasir dan tanah lempung. Bagian timur pulau Komodo, Padar dan Rinca umumnya sangat curam dengan bentukan batuankarang yang mengandung zat kapur. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat)

2. Demografi

Terhitung sudah 12 tahun Manggarai Barat menjadi Kabupaten, tepatnya Pada 1 september 2003 Manggarai Barat resmi mencatatkan dirinya menjadi kabupaten baru yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan di atur dalam UU NO 8 2003, dengan usianya yang masih relatif mudah manggarai barat terus membenah dan mempercantik dirinya, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sebagai satu satunya daerah yang di mekarkan selama periode 15 tahun terakhir ini untuk wilayah pulau Flores, Manggarai Barat terus menambah deretan angka populasi penduduk di provinsinya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2014 total penduduk yang ada di kabupten manggarai barat sebanyak 353959, tentu ini angka yang cukup fantastis mengingat usianya yang masih relatif muda. (Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Manggarai Barat)

Bagi pemerintah daerah setempat data ini tidak cukup mengagetkan sebab selain di karenakan angka kelahiran yang cukup tinggi migrasi adalah penyumbang terbanyak atas besaran angka sensus penduduk di kabupaten manggarai barat. Pada suatu wilayah proses migrasi itu sendiri terbilang wajar baik di kota-kota besar maupun bagi daerah yang baru di mekarkan. ini terjadi bukan tanpa alasan, masalah ekonomi menjadi faktor penting di samping adanya pemenuhan akan kebutuhan sumberdaya manusia.

Bagai masyarakat hadirnya beberapa kelompok masyarakat baru adalah bagian dari dinamika kehidupan sosial dan bagai pemerintah sendiri adalah konsekuensi logis yang harus di terima oleh suatu daerah, demikian pula bagi masyarakat migran itu sendiri, penyesuaian diri menjadi penting dalam lingkungan baru karena dengan migrasi sehingga masyarakat

dalam suatu wilayah akan menjadi beragam baik bahasa, budaya dan agama. Sebagai makhluk sosial keberagaman tentu menjadi keharusan untuk di terima oleh setiap manusia baik hidup dalam berkelompok maupun individu.

Tidak terkecuali bagi Pulau Komodo yang terletak di bagian barat berbatasan dengan selat Sape NTB. Di pulau Komodo berbagai masyarakat dengan latar belakang suku yang berbeda tinggal dan menetap disana yang mayoritas keturunan Bugis, Bajo, Bima NTB. Untuk mengetahui lebih jauh jumlah penduduk yang ada di pulau Komodo dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel: 1.1 Jumlah Penduduk Desa Komodo Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
	P	W	
2014	572	623	1195
2015	580	634	1214
2016	589	641	1230
2017	601	650	1251

**Sumber: Arsip Desa Komodo.*

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk di desa komodo meningkat dari tahun ke tahun yaitu sebesar 1251 jiwa di tahun 2017.

Umumnya masyarakat pulau Komodo adalah masyarakat yang mata pencahariaannya bersumber pada hasil laut, pemanen rumput laut, sementara sebaian penduduk lainnya adalah pedagang dan pegawai negeri dan ada pula penduduk yang berkebun dan menjual hasil hutan seperti asam. namun belakangan pasca adanya pembatasan zona wilayah perairan Taman Nasional Komodo yang dimana puncak dari pemberlakuan hukum di kawasan taman Nasional Komodo terjadi di tahun 2013 pasca di adakannya sail Komodo di kabupaten Manggarai Barat, dan pulau Komodo menjadi icon utama dari agenda kegiatan sail komodo,

sehingga segala bentuk aktifitas masyarakat yang ada di pulau komodo itu di batasi, termasuk melaut itu sendiri. Dan itu kemudian terjadi hingga saat ini.

B. Hasil dan Pembahasan.

1. Pemberdayaan masyarakat pulau Komodo pasca pembatasan zona wilayah perairan taman nasional Komodo.

a. Taman Nasional Komodo dan Kawasan Konservasi.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang menyimpan kekayaan, keanekaragaman hayati yang amat sangat besar, beragam jenis tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, dan jasad renik lain banyak terdapat di Indonesia, bahkan banyak jenis makhluk hidup yang merupakan makhluk hidup endemic atau hanya ditemukan di suatu daerah saja, agar keanekaragaman hayati ini tetap terjaga dengan baik, diperlukan suatu upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati tersebut, salah satu upaya untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu dengan melakukan perlindungan alam seperti pembuatan Taman Nasional. Taman nasional yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya pariwisata, dan rekreasi.

Taman Nasional dan kawasan Konservasi merupakan aset umum yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Konservasi menurut Asmin (2004). Adalah pengelolaan penggunaan manusia atas biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan terbesar pada generasi sekarang, sementara memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masa depan, sejak tahun 1920, Indonesia telah menerapkan konsep pengelolaan kawasan lindung untuk tujuan konservasi alam, hal ini ditandai dengan didirikannya kawasan konservasi (KK) pertama di Indonesia yaitu cagar alam Pancoran Mas di Depok, Jawa Barat pengembangan dan praktik kawasan konservasi di perluas di lokasi lokasi lain dan di

dasarkan pada konsep konservasi alam klasik yang melihat perlunya prngawetan dan perlindungan sumberdaya alam dan spesies-spesies organisme yang terancam punah oleh kegiatan manusia. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai taman nasional yang tersebar di beberapa daerah di seluruh kawasan Indonesia salah satunya yaitu Taman Nasional Komodo yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Taman Nasional Komodo (TNK) merupakan satu kawasan yang terdiri dari pulau-pulau, baik yang berpenghuni ataupun tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni diantaranya adalah di Pulau Komodo, Pulau Rinca Desa Pasir Panjang dan Pulau Papagarang yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Komodo. letak Taman Nasional Komodo berada di antara dua provinsi, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Sumbawa) dan provinsi Nusa Tenggara Timur (Pulau Flores). Taman Nasional Komodo merupakan kawasan konservasi guna melindungi binatang komodo (*Varanus Komodoensis*). Sejak ditemukannya komodo pada 1911 oleh JKH Van Steyn yang tercantum didalam SK Menteri Kehutanan No. 306/Kpts-II/1995, Komodo kemudian diberi nama *Varanus Komodoensis* oleh PA. Owens pada 1912. Hingga tahun 1930-an Pulau Komodo berada dibawah pemerintahan Kesultanan Bima, sehingga tanggal 30 April 1915 No. 163a (Verordening van het Sultanaat van Bima van 30 April 1915 No. 163a) Sultan Bima pun mengeluarkan peraturan untuk melindungi binatang komodo (Komodo National Park Authority). Selain itu Taman Nasional Komodo juga ditetapkan sebagai Kawasan Perlindungan Laut pada tahun 2000 serta sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Pada tanggal 11 November 2011, Taman Nasional Komodo terpilih menjadi salah satu pemenang sementara *New 7 Wonders* (Tujuh Keajaiban Dunia Baru) berdampingan dengan Hutan Amazon, Teluk Halong, Air Terjun Iguazu, Pulau Jeju, Sungai Bawah Tanah Puerto Princesa, dan Table Mountain. Di keseluruhan pemenang sementara tersebut, Taman Nasional Komodo mendapatkan suara terbanyak. Oleh karena itu Taman Nasional Komodo akhirnya ditetapkan sebagai salah satu

dari 7 Keajaiban Dunia Terbaru pada tanggal 13 September 2013, kini Komodo bukanlah sekedar binatang yang dijaga dan dilindungi, tetapi binatang komodo adalah sebagai identitas baru bagi orang-orang di Nusa Tenggara Timur. Sebelum ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional, orang-orang di tiga kampung itu telah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka.

Berdasarkan, Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2011. Tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menjelaskan bahwa kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Dalam Permenhut No. P. 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional dijelaskan bahwa zonasi TN adalah suatu proses pengaturan ruang dalam TN menjadi zona-zona. Zona TN adalah wilayah di dalam kawasan TN yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Proses pengaturan tersebut meliputi tujuh kegiatan: 1) persiapan, 2) pengumpulan dan analisis data, 3) penyusunan draf rancangan zonasi, 4) konsultasi publik, 5) pengiriman dokumen, 6) tata batas dan 7) penetapan. Tujuh langkah penetapan zona di TN dan kriteria penetapannya berdasarkan Permenhut senantiasa menjadi acuan baku bagi para pengelola TN dalam penataan dan penetapan zona. Artinya bahwa setiap taman nasional dan kawasan konservasi memiliki setidaknya pembatas ruang ruang dengan keberfungsian masing-masing atau yang di sebut zonasi, untuk wilayah kawasan taman nasional, zonasi merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan agar mampu membedakan ruang atau zonasi yang dapat di akses dengan mudah ataupun tidak, untuk kawasan taman nasional Komodo sendiri ada beberapa zonasi yang sudah ditetapkan, berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang zonasi yang ada di dalam kawasan taman nasional Komodo.

Tabel 1.2. Zona-Zona yang ada di kawasan taman Nasional Komodo

No	Zona	Luas Zona
1	Zona Inti	34.311 ha
2	Zona Rimba	96.682 ha
3	Zona Rimba daratan Zona rimba perairan	22.187 ha 36.308 ha
4	Zona pemanfaatan tradisional daratan Zona pemanfaatan tradisional perairan	879 ha 17.308 ha
5	Zona pemanfaatan wisata perairan	1.584 ha
6	Zona pemanfaatan plagis	59.601 ha
7	Zona penelitian dan pelatihan perairan Zona penelitian dan pelatihan daratan	- -
8	Zona Lainnya	298 ha
9	Zona khusus(Pemukiman)	298 ha
	Total	173.300 ha

*Sumber: Arsip Balai taman Nasional Komodo

Komodo kini menjadi tujuan pariwisata, selain keindahan alam di Nusa Tenggara Timur keberadaan binatang langka ini menjadi penarik minat bagi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Bahkan, setelah komodo menjadi bagian dari Situs Warisan Dunia (World Heritage Site) yang ditetapkan oleh UNESCO pada 1991, Nusa Tenggara Timur menjadi tujuan para wisatawan, baik hanya sekedar untuk berlibur ataupun untuk penelitian dari berbagai macam latar belakang pendidikan.

b. Masyarakat dalam zona taman nasional Komodo.

Pembentukan Taman Nasional adalah pembentukan kawasan pelestarian alam. Upaya mempertahankan ekosistem asli itu ditempuh dengan sistem zonasi. Tujuannya antara lain menunjang usaha penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Akan tetapi pencapaian manfaat itu harus dibayar mahal yakni sebisa mungkin keterlibatan dan aktivitas manusia dibatasi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2011).

Pengelolaan kawasan Taman Nasional, praktis dan pemerhati Konservasi di Indonesia telah menyadari dan merasakan bahwa pengelolaan Taman Nasional di hampir semua daerah menghadapi tantangan besar, yakni bagaimana mewujudkan pola pengelolaan yang menjamin tercapainya kepentingan konservasi dan sekaligus memberi sumbangsih kepada kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di dalam dan di sekitar Taman Nasional dan kawasan Konservasi, namun demikian bahwa konservasi di Indonesia sedang mengalami kebuntuan, semua kawasan konservasi yang merupakan aset umum (*public good*) dan di kelola pemerintah untuk kepentingan umum telah mengalami kerusakan, pengurangan luas atau di perebutkan oleh berbagai pihak yang ingin memanfaatkan kawasan tersebut untuk kepentingan lain, khususnya Tamana Nasional tidak ada yang tidak mengalami tekanan dan tidak ada yang tanpa keberadaan masyarakat, akar masalahnya kompleks, kebanyakan Taman Nasional baru di tunjuk dan belum dikukuhkan, ditetapkan tanpa konsultasi dengan pihak lain dan tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat di kawasan tersebut.

Konservasi di lihat sebagai hambatan terhadap pembangunan sehingga kurang di dukung bahkan di lawan oleh banyak pihak, akibatnya konservasi tidak berjalan dengan baik, sementara di dalam dan sekitar taman nasional sudah terlanjur ada masyarakat yang hidup dan menggantungkan kehidupan mereka dalam kawasan tersebut. Pola pikir pemerintah yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dalam menyikapi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan taman nasional adalah menempatkan masyarakat tersebut sebagai objek pengelolaan yang menjadi bagian dari potensi pengembangan wisata, bahkan terkadang ditempatkan sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan konservasi. Tradisi pemanfaatan sumber daya alam di dalam kawasan taman nasional oleh masyarakat adat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya seringkali dinilai sebagai tekanan ataupun ancaman terhadap keutuhan ekologis kawasan hutan milik pemerintah.

Seperti yang telah di sebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut II/2006 tentang pedoman zona Taman Nasional bahwa masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Konservasi dan Taman Nasional masuk ke dalam kriteria zona khusus, maka hampir pasti dikatakan keberlangsungan hidup masyarakat dalam kawasan Taman Nasional bergantung pula pada sumberdaya alam yang ada di sekitar Taman Nasional itu sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara kawasan taman nasional dan wilayah yang di diami masyarakat, sehingga muncul konflik ruang dan sumber daya alam, pun demikian yang terjadi dengan kawasan Taman Nasional Komodo.

Hadirnya taman Nasional dan kawasan Konservasi berikut dengan sistem zonasinya seolah menjadi masalah yang berkepanjangan bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan taman nasional komodo yang notabene mayoritas dari masyarakat tersebut berprofesi sebagai nelayan, sementara kawasan taman nasional Komodo sebagian besarnya adalah kawasan perairan maka sudah menjadi barang pasti perairan di sekitar taman nasional Komodo masuk dalam kawasan zonasi atau kawasan yang dilindungi, hal ini mengakibatkan ruang gerak yang terbatas bagi masyarakat pulau Komodo yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan tentunya dianggap merugikan masyarakat setempat dan berdampak pada penghasilan nelayan yang semakin berkurang akibat adanya zonasi dan larangan untuk menangkap ikan atau aktifitas ekonomi lainnya yang bersentuhan langsung dengan kawasan perairan Taman Nasional Komodo. Larangan ini tentunya bukan tanpa alasan, demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, demi menjaga keberlangsungan hidup komodo sebagai hewan yang terancam punah dan juga demi kelestarian ekosistem biota laut maka, aktifitas menangkap ikan di kawasan ini harus di hentikan, penghentian aktifitas menangkap ikan sekaligus menjadi awal lesuhnya perekonomian dan aktifitas melaut bagi warga pulau Komodo.

Akibat kebutuhan investasi yang jauh lebih besar ini mengakibatkan kelompok masyarakat di pulau Komodo cenderung tertinggal jauh dari kelompok masyarakat yang ada di daratan kota yang secara langsung dapat merasakan dan menikmati hasil dari pada pembangunan daerah yang di kenal dengan wisata baharinya ini, bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daratan kota ini misalnya bisa mendapatkan penghasilan dengan menyediakan transportasi laut atau penginapan bagi wisatawan sebelum atau bila ingin berkunjung di pulau-pulau tertentu, kecendrungan ini pada gilirannya melahirkan keterasingan kelompok yang tidak hanya dapat di lihat dari tingkat pendapatan yang di miliki, namun juga pada kualitas hidup dan pola aktivitas ekonomi masyarakat pulau Komodo.

Seperti halnya beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, berikut kutipan wawancaranya:

“kami sudah turun temurun tinggal di pulau komodo ini, bahkan jauh sebelum adanya kabupaten Manggarai Barat kami sudah lebih dulu ada disini, selama itu juga kami menggantungkan hidup dilaut, tapi kenapa semenjak komodo jadi 7 keajaiban dunia kami tiba-tiba dilarang untuk melaut tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu, itupun kami tau disaat kami sudah berada di laut yang katanya kami sudah memasuki zona yang di lindungi, dan kami di usir dari situ, padahal kami tidak mencuri atau pake alat tangkap ikan yang membahayakan lingkungan laut.” (Bpk Nawing, 12 Oktober 2017)

Lagi menurut penuturan salah seorang narasumber saat di wawancarai, berikut kutipan wawancaranya:

“semenjak adanya larangan untuk melaut disekitaran pulau komodo semenjak itu juga saya belum punya pekerjaan tetap, kadang saya cari kayu api untuk di jual, dengan harga 3 ribu rupiah per ikat, itupun saya hanya di bolehan mengambil kayu yang sudah mati atau batang-batang pohon sudah jatuh dari pohonnya saja yang bisa di ambil, kadang juga saya melaut, tapi melautnya bermil-mil, jauh dari kawasan taman nasional, tentunya semaijn jauh kita mealut semkin besar biaya yang harus kita keluarkan untuk bahan bakar perahu, belum lagi untuk konsumsi selama melaut, kadang saya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari” (bpk Nua, 12 Oktober 2017)

“Selain mealut biasanya saya juga mengumpulkan hasil kebun seperti kelapa dan asam untuk dijual, tapi semenjak adanya larangan-larangan itu, semua aktifitas yang biasa saya lakukan sekarang sudah saya batasi, karna pengalaman pribadi saya, saya pernah di marahi habis-habisan oleh pegawai BTNK beserta Polair yang bertugas,

bahkan saya di desak untuk tunjukan KTP ,waktu itu, saya sendiri heran masa pergi melaut apalagi jaraknya tidak jauh dari kampung harus membawa KTP bahkan tanpa sosialisasi terlebih dahulu” (Bpk. Sukri, 12 October 2017)

Di lain kesempatan peneliti mewawancarai kepala desa Komodo, berikut kutipan wawancaranya:

“memang ada program pemerintah untuk yang ada dalam kawasan taman nasional komodo, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun dari sekian banyak masyarakat yang kami targetkan untuk terlibat dalam program ini, kami hanya mendapat respon separuh dari mereka, dengan berbagai macam alasan, baik itu alasan tidak memiliki keterampilan di bidang itu atau alasan lainnya karna mereka kecewa kepada kami (pemerintah) atas adanya zonasi yang membatasi ruang gerak mereka, tapi tentu kami tetap mengupayakan agar mereka mau terlibat, sebab berdasarkan data peserta yang kami miliki ada peningkatan peserta dari tahun ketahun. (H. Aksan 13 Oktober 2017)

Pembentukan taman nasional dan kawasan konservasi di Indonesia memang rentang terhadap konflik dan disintergasi sosial hal ini disebabkan karna pembentukian kawasan taman nasional dan konservasi tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang mendiami wilayah itu sendiri, seperti halnya yang terjadi di kawasan taman nasional Komodo dan berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang merasa di rugikan hal ini disebabkan karna hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan yang muaranya menimbulkan kemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat yang ada di dalam kawasan taman nasional itu sendiri. Bahkan sebahagian masyarakat terpaksa melakukan pekerjaan atau beralih profesi yang bukan keahliannya, atau keterpaksaan akibat desakan akan kebutuhan hidup sehari-hari.

Perubahan sumber mata pencarian hidup yang drastis masyarakat desda Komodo, dari berburu dan meramu, berpindah menjadi nelayan dan terakhir menjadi pematung dan penjual souvenir, adalah fakta lain di balik penetapan zonasi di kawasan pulau komodo, kenyataan seperti itu sudah biasa mereka alami, tidak hanya karena minimnya pengetahuan dan publikasi tentang mereka, tetapi juga karena mereka pernah alami kejadian yang lebih

kejadian dari itu. Pada awal pembentukan TNK, penduduk komodo nyaris dipindahkan ke daratan pulau Flores, dan mereka menolak keras rencana tersebut.

Semenjak terbentuknya kawasan TNK, sudah mulai mengubah kondisi kehidupan masyarakat di pulau Komodo secara drastis. Pulau itu diperlakukan sebagai zona terlindungi dan mengikuti model Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat, tuntutannya, sebisa mungkin aktivitas manusia dalam kawasan ditiadakan, hal itu ditempuh melalui pembentukan zonasi .

Berikut adalah tabel yang menjelaskan jumlah masyarakat nelayan dan petani rumput laut yang menjadi profesi mayoritas penduduk desa komodo.

Tabel 1.3. Jumlah nelayan di desa Komodo tahun 2014-2017

Tahun	Nelayan	Petani Rumput Laut
2014	236	-
2015	173	-
2016	102	68
2017	71	8

**Sumber: Arsip desa Komodo*

Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah keseluruhan nelayan yang ada di desa Komodo, baik nelayan penuh maupun nelayan sambilan. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah nelayan yang ada di pulau Komodo dari tahun ke tahun kian menurun tercatat pada akhir tahun 2017 tersisa 71 nelayan dan 8 orang petani rumput laut, ini menunjukkan bahwa dampak dari pembatasan zona taman nasional sangat besar terhadap aktifitas mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa komodo.

Adalah zona khusus yang diartikan sebagai zona untuk mengakomodasi kelompok masyarakat yang telah tinggal di kawasan TN sebelum ditetapkan dan atau mengakomodasi sarana/prasarana, seperti telekomunikasi, transportasi, dan listrik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi wilayah potensial Zona Khusus berbeda-beda di setiap TN.

Karena itu, batasan zona khusus dan kriteria penetapannya seharusnya beragam, sesuai dengan kondisi setempat dan kesepakatan para pihak, bagian tidak terpisahkan dari TN, Zona Khusus dikelola menurut peraturan pengelolaan TN. Akan tetapi, zona khusus juga harus mempunyai pengaturan dan organisasi khusus, yang dikembangkan secara multi pihak berdasarkan kesepakatan sehingga terwujud kelestarian TN. Organisasi tersebut memperoleh kewenangannya dari Balai TN, bertanggung jawab mencapai pengelolaan TN secara lestari (tujuan konservasi) dan memberi peluang bagi pembangunan masyarakat. Penetapan sebuah wilayah menjadi zona khusus di TN bukan merupakan pemutihan atas pelanggaran hukum, melainkan sebuah upaya menembus kebuntuan dalam penataan ruang di TN. Gagasan yang mendasari konsep ini adalah terakomodasinya pembangunan ekonomi ramah lingkungan dalam batasan yang ditetapkan fungsi konservasi TN. Tujuan umum zona khusus yang harus dicapai adalah membuka peluang bagi para penyelenggara pembangunan untuk mewujudkan konservasi dan ekonomi berwawasan lingkungan. Secara khusus zona khusus bertujuan membuka jalan keluar, menembus kebuntuan penataan ruang, mempermudah pengelolaan TN, dan memungkinkan berfungsinya zona khusus sebagai zona penyangga zona inti.

Seperti yang kemudian di ungkapkan oleh salah seorang narasumber dari BTNK saat di wawancarai, berikut kutipan wawancaranya.

“Sebenarnya tidak sepenuhnya benar apabila kami melarang masyarakat atau membatasi ruang gerak aktifitas masyarakat, karna di hampir semua taman nasional yang ada di Indonesia itu pasti ada yang namanya zona khusus, nah zona khusus ini fungsinya untuk masyarakat, seperti perkampungan atau pemukiman masyarakat, tapi tentu dengan batas batas tertentu, dan aktifitas di dalam zona khusus ini pastinya tidak boleh ada yang berpotensi merusak lingkungan, hanya mungkin masyarakat tidak memahami itu” (Bpk Saiful, 14, Oktober 2017)

Atas dasar adanya hubungan yang bersifat ekonomi dan saling membutuhkan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini TNK yaitu adanya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya yang berada di kawasan TNK, maka Sejalan dengan hal itu untuk mengurangi tekanan di tengah himpitan ekonomi maka masyarakat lokal di berdayakan

dalam kegiatan ekowisata berbasis masyarakat, mengingat masih banyak potensi sumberdaya yang bisa di kelola melalui pemberdayaan ini yang juga berpotensi menjadi daya tarik wisatawan. Selain dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian perekonomian masyarakat lokal, pemberdayaan melalui ekowisata ini juga dapat memberikan keuntungan bagi Taman Nasional itu sendiri.

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Komodo.

Pemberdayaan pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat, agar masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial yang kurang berdaya menjadi berdaya, agar hal ini dapat terwujud tentunya proses pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama antara mereka yang melakukan pemberdayaan dengan masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah sosial khususnya masalah kemiskinan, di sisi lain masyarakat sebagai objek dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga memiliki tanggung jawab akan mengatasi masalahnya, jadi dalam mengatasi masalah sosial pemerintah dan juga masyarakat perlu bekerja sama dalam mengatasinya, karena pemerintah hanya bisa memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya, tinggal bagaimana respon masyarakat atas fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberdayaan sebagai sarana untuk masyarakat dalam mempermudah mengatasi kondisi kesulitan yang terjadi di masyarakat, disini konsep memberdayakan masyarakat, tidak hanya sekedar memberikan bantuan secara pendanaan saja pemberdayaan ini juga mengajari dan membentuk masyarakat untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab dalam kondisi yang terjadi di masyarakat serta diajak untuk berpartisipasi aktif dalam program yang diadakan ini, kesadaran menjadi hal yang penting dalam menyelesaikan masalah sosial ini, karena dengan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat maka pemerintah menjadi terbantu dalam proses mengatasi masalah sosial di masyarakat, keuntungan yang didapat juga diperoleh kedua pihak, masyarakat juga akan

merasakan hak-haknya terpenuhi dan pemerintah menjadi berkurang beban kerjanya, demikian pula yang dirasakan oleh kepala desa Komodo bahwa masyarakat harus sudah sadar, bahwa label komodo sebagai ikon pariwisata di NTT bahkan masuk sebagai tujuh keajaiban dunia oleh UNISCO, menjadikan desa Komodo sebagai destinasi pariwisata yang menjanjikan dengan julukan sebagai kampung wisata Komodo, kampung wisata Komodo sendiri menyimpan begitu banyak spot atau destinasi yang wajib dikunjungi wisatawan seperti pulau Kelor, pulau Padar, pantai Pink, dan Loh Buaya, hal ini tentunya bisa di manfaatkan sebagai sumber penghasilan yang baru salah satunya melalui proses pemberdayaan, sebab setiap pemberdayaan yang dilakukan adalah untuk mencapai sebuah perubahan agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Namun yang menjadi tujuan utama pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, karena adanya kemiskinan dilihat dari kemampuan ekonomi yang rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Berangkat dari keinginan Pemerintah setempat untuk melakukan perubahan dan memajukan Desa Komodo dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka melalui perangkat pemerintahan dan peran masyarakat Desa Komodo bersama-sama untuk mengembangkan dan membangun potensi wilayah yang ada di Desa Komodo bertujuan agar masyarakat bisa mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk produk dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Komodo, antara lain sebagai berikut:

1. Kerajinan tangan (patung Komodo dan Aksesoris)

yaitu berupa Kerajinan tangan mengukir Patung Komodo yang berbahan dasar kayu yang ada di sekitar kawasan taman nasional Komodo, dalam proses pembuatannya biasanya untuk satu patung Komodo memakan waktu 2-3 hari.

Sementara untuk pembuatan aksesoris bahan dasarnya dari tempurung kelapa yang di bentuk sedemikian rupa hingga terlihat memiliki nilai seni yang menjual.

2. Baju Komodo (baju bergambar Komodo)

Yaitu berupa pemberdayaan yang menekankan pentingnya pengetahuan akan pengoprasian alat elektornik demi menunjang kegiatan pemberdayaan ini, karna dalam proses pembuatan patung Komodo, dibutuhkan kemampuan mendesain motif atau gambar yang akan digunakan untuk menunjang kegaiatan pembuatan patung Komodo, namun umumnya dalam pemberdayaan pembuatan baju bergambar Komodo ini masyarakat hanya memesan baju bergambar komodo kemudian memasarkannya, hal ini disebabkan karna keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan alat elektronik seperti Komputer.

3. Pengrekrutan klompok masyarakat menjadi ranger Komodo (Penjaga Komodo)

Yaitu kelompok masyarakat yang di rekrut oleh BTNK (Balai taman nasional komodo) untuk menjadi bagian dari BTNK dalam menjaga dan mengawasi aktifitas komodo dan juga sekaligus berfungsi sebagai pemanadu dan penjaga wisatawan yang datang berkunjung untuk melihat langsung satwa langka ini, sebab selain berfungsi sebagai penjaga satwa komodo, mereka juga berfungsi sebagai pawang komodo.

Kerajinan tangan berupa patung Komodo dan souvenir merupakan kerajinan seni mengukir dan membentuk Komodo, yang berbahan dasar dari kayu Kelumpang. Kerajinan ini adalah salah satu dari beraneka ragam kerajinan tradisional Indonesia yang patut dikembangkan, selain itu juga bahan dari kerajinan ini tersebar luas di sekitar Taman Nasional Komodo.

Seperti yang kemudian di ungkapkan oleh Kepala desa Komodo bahwa:

“Karna tingginya angka kunjungan wisatawan ke desa kami dan hal itu sangat berbanding terbalik dengan fenomena dan kondisi masyarakat kami, maka kami mencoba peruntungan melalui pemberdayaan, di harapkan bisa melibatkan masyarakat secara langsung dalam membangun desa dan ekonominya sendiri, contohnya melalui pembuatan dan penjualan patung komodo, aksesoris dan baju komodo, apa lagi wisatawan sendiri sejak dulu semenjak pemberdayaan ini belum ada permintaan akan cendra mata oleh wisatawan sangattr tinggi, tapi Alhamdulillah semua ini sudah berjalan bertahun-tahun” (H. Aksan, 14 Oktober 2017)

Demikian juga yang diungkapkan oleh narasumber dari BTNK, berikut kutipan wawancaranya:

“Keterlibatan kami dalam pemberdayaan masyarakat ini dikarenakan untuk kembali menjalin hubungan yang baik antara BTNK dan masyarakat pasca adanya zonasi beserta aturan dan larangan-larangannya, dan respon masyarakat juga cukup baik meskipun pada awalnya tidak semua masyarakat menyambut baik, dan ke dua, karna tingginya permintaan wisatawan akan oleh-oleh atau buah tangan khas dari desa Komodo, maka waktu itu kami coba mendiskusikan dengan pemerintah desa Komodo terkait pemberdayaan, dan tahun berikutnya pemberdayaan ini sudah mulai jalan dan di sosialisasikan, adapun bentuk produk pemberdayaan ini berupa patung komodo dan aksesoris juga baju komodo ide itu justru hadir dari masyarakat itu sendiri” (Rasid, 14 Oktober 2017)

Kerajinan tangan patung Komodo, aksesoris dan baju Komodo dari awal merintis sampai sekarang semakin meningkat. Berkat ide kreatif dan inovatif dari warga beserta pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah pemerintah mampu memberikan manfaat dan hasil untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memberikan keterampilan untuk kecakapan hidupnya dan menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seiring berjalannya waktu kerajinan tangan ini sering mengikuti pameran kerajinan tangan baik tingkat Provinsi sampai mancanegara, terakhir kerajinan tangan ini hadir dalam daftar peserta pameran di kegiatan Sail Komodo yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat, dari hasil pameran tersebut semakin diminati oleh para konsumen baik lokal maupun mancanegara, bahkan kerajinan tangan ini tercatat sebagai yang terlaris dalam kegiatan tersebut.

Beberapa hal diatas semakin memicu semangat pemerintah untuk terus menggaungkan pemberdayaan ini, agar semakin banyak masyarakat yang mau ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pemberdayaan ini. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala desa Komodo.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, diantaranya adalah kepala desa Komodo:

“Kami berharap bahwa semua masyarakat desa Komodo bisa ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan ini, agar mereka juga terbantu dari segi ekonomi, apalagi desa Komodo ini tidak pernah sepi kedatangan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, jadi kami ingin memanfaatkan itu menjadi peluang bisnis untuk masyarakat, meskipun sebagian masyarakat ada yang sudah terlibat dan belum terlibat ” (H. Aksan. 15 Oktober, 2017)

Di lain kesempatan peneliti memwawancarai salah seorang dari Balai Taman Nasional Komodo, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, bahwa adanya sistem zonasi menjadi alasan kurangnya ketelibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan, sistem zonasi menimbulkan konflik vertikal yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat, hal ini berdampak pada program pemberdayaan yang menyasar masyarakat. Berikut kutipan wawancaranya.

“Di awal-awal diadakannya pemberdayaan ini, kami cukup kesulitan untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi, karna mereka tidak mau membuka diri, terlebih kepada kami yang di BTNK, karna mereka tau ada kerja sama antara desa dan BTNK dalam proses pemberdayaan ini, alasan kemarahannya sudah pasti karna sistem zonasi, yang dimana fungsi kami selaku BTNK mengawasi kawasan taman nasional ini. Padahal dalam program pemberdayaan ini kami butuh partisipasi masyarakat, baik berupa ide pemberdayaan atau masukan apa saja yang membangun” (Rasid, 15 Oktober, 2017)

Namun demikian tidak semua masyarakat desa Komodo yang ingin di berdayakan mengalami masalah yang sama dengan pemerintah setempat yang disebabkan oleh adanya zonasi kawasan taman nasional Komodo, beberapa dari mereka sejak awal ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan ini.

Keterlibatan dan partisipasi penuh masyarakat dalam proses pemberdayaan di desa Komodo baru mulai terlihat pasca berjalanya proses pemberdayaan itu sendiri, faktor ajakan dari masyarakat yang lebih dulu terlibat dalam pemberdayaan di tambah dengan adanya peningkatan ekonomi yang dirasakan menyebabkan masyarakat lainnya tertarik dan mulai ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan meskipun dalam pelaksanaannya masyarakat yang belakangan ikut terlibat hanya ikut berpartisipasi dalam memperoleh manfaat.

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang peningkatan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan di desa Komodo.

Tabel 1.4. Jumlah warga yang ikut dalam pemberdayaan dari 2014-2017

Tahun	Jenis-Jenis Kerajinan yang di berdayakan			Jumlah
	Patung Komodo	Souvenir	Baju Komodo	
2014	42	-	-	42
2015	44	-	26	87
2016	74	-	52	126
2017	91	58	102	251

**Sumber: Arsip Desa Komodo*

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa ada peningkatan jumlah warga yang di berdayakan, yaitu sebesar 251 orang di tahun 2017, peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2016 yaitu sebanyak 74 orang dari 44 orang di tahun sebelumnya. Sementara jenis kerajinan yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu baju komodo, dimana jenis ini mengalami peningkatan sebanyak 102 orang di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 52 orang saja. Sementara jenis souvenir tidak begitu menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan jumlah warga yang ikut serta baru tercatat pada tahun 2017 saja.

d. Proses Pemberdayaan Masyarakat desa Komodo.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga

langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat.

Di tengah memuncaknya arus wisatawan yang datang berkunjung ke kawasan taman Nasional Komodo mendorong pemerintah untuk melahirkan berbagai macam gebrakan demi menunjang perekonomian daerah disektor pariwisata, tidak terkecuali bagi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa pulau Komodo, oleh pemerintah setempat melalui program pemberdayaan, warga di dorong untuk ikut serta berpartisipasi dalam menumbuhkan ekonomi warga itu sendiri, mengingat hampir sebagian masyarakat pulau Komodo tidak lagi memiliki mata pencahariaan yang tetap akibat banyaknya aturan yang diberlakukan di sekitar wilayah yang mereka tinggali, salah satunya pembatasan zona perairan, yang menjadi akses mata pencaharian mereka selama ini, namun demikian untuk mencapai target pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan tentu tidak dengan mudah begitu saja dapat dilakukan, ada upaya-upaya tertentu yang mestinya menjadi pendorong terjadinya proses pemberdayaan itu sendiri seperti misalnya:

1. Bantuan modal.

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan. Tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya khususnya masyarakat desa Komodo yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, yang sudah sejak lama mengalami privatisasi ruang penghidupan mereka berupa adanya pembatasan bagi nelayan untuk melaut.

Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi menjadi fator penting yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu *Pertama*, lemahnya ekonomi masyarakat ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang tidak mempunyai faktor produksi, atau masyarakat nelayan yang pendapatannya bergantung pada hasil laut yang tidak menentu. Dalam

pemberdayaan aspek ini, nampaknya pemberdayaan masyarakat perlu dipikirkan bersama, namun perlu pula mencermati usaha pemberdayaan masyarakat melalui aspek pemodalannya adalah, a) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; b) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru melalui usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses dilembaga keuangan, c), bagaiman skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsystem. Adapun bentuk bantuan modal yang bersumber dari dana desa yang sebagiannya dialokasikan untuk masyarakat yang di berdayakan dengan cara pengadaan alat untuk menunjang pemberdayaan.

Pun demikian pula dengan pemberdayaan yang terjadi di desa Komodo, Seperti yang di utarakan oleh salah seorang narasumber yang peneliti wawancarai, berikut kutipan wawancaranya:

“Sejak awal di lalukannya sosialisasi pemberdayaan ini saya sudah ikut terlibat baik dari segi ide maupun pelaksanaannya, meskipun pada awal-awalnya saya sedikit ragu karna minimnya modal yang saya miliki, tapi dari pemerintah, kami tidak hanya di beri arahan atau pendampingan, kami juga di berikan modal awal untuk pemberdayaan kerajinan patung komodo ini” (Saruddin, 17 Oktober, 2017)

Lagi menurut salah seorang narasumber yang mengalami keterbatasan modal untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan ini, berikut kutipan wawancaranya:

“dulunya saya hanya mengerjakan urusan rumah tangga, sementara suami saya bekerja di laut sebagai nelayan, tapi semenjak dia tidak lagi melaut kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya ada program pemberdayaan ini dan suami mengizinkan saya untuk ikut kegiatan ini, dan melalui kegiatan ini saya merasa cukup terbantu” (Ibu Dariah, 17 Oktober 2017)

2. Pelatihan

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat

dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu kegiatan penanggulangan kemiskinan yang cukup efektif untuk mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas SDM dan perubahan perilaku secara kolektif aparat pemerintah dan pokmas di desa Komodo. Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa Komodo, menciptakan masyarakat yang berdaya, yang memiliki kualitas yang unggul dan berperan sebagai aktor utama pembangunan, pendidikan dan pelatihan tentu merupakan kunci utama di dalamnya. Rancangan pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang tinggi terhadap peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang kemudian diungkapkan oleh kepala desa Komodo saat di wawancarai, berikut kutipan wawancaranya:

“dalam menunjang proses pemberdayaan ini, tentunya ada beberapa langkah yang kami lakukan selain memberikan bantuan modal, kami juga meplakukan pelatihan dalam proses pemberdayaan ini, contohnya, memberikan pelatihan cara membuat patung komodo hingga pelatihan dalam hal memasarkan produk kepada wisatawan, khususnya kepada wisatwan asing, agar nantinya konsumen dalam hal ini wisatawan asing tadi tidak kebingungan ketika ingin membeli barang” (H. Aksan 17 Oktober 2017)

Di lain kesempatan peneliti kembali mewawancarai salah seorang narasumber dari BTNK yang kemudian bekerja sama dengan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan dan pelatihan

Berikut kutipan wawancaranya:

“Di karenakan komodo sebagai pintu masuk wisatawan sehingga BTNK dan desa bekerja sama untuk memberikan pelatihan kepada warga dalam membuat patung komodo dan souvenir” (Saiful, 18 oktober 2017).

Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa peserta yang diberdayakan dalam hal ini adalah masyarakat desa Komodo itu sendiri, berikut kutipan wawancaranya:

“di awal saya ikut kegiatan pemberdayaan ini, saya benar-benar tidak mengerti apa yang harus saya lakukan, karna saya sama sekali tidak memiliki keterampilan begini, karna selama ini pekerjaan saya hanya melaut, tapi seiring berjalannya waktu saya mulai bisa membuat patung sendiri dan istri saya sudah bisa membuat aksesoris sendiri, tentunya ini tidak lepas dari bimbingan serta arahan yang diberikan oleh pemerintah” (Jamal, 18 Oktober 2017)

“selain sulit, membuat patung Komodo itu memakan waktu cukup lama untuk satu patung Komodo dengan beragam gaya dan model patungnya, dan saya pribadi merasa sangat kesulitan, bahkan hampir meninggalkan pekerjaan ini, tapi karna adanya dorongan serta bimbingan yang terus diberikan, sekarang saya sudah mampu membuat patung Komodo dengan berbagai macam model” (Kasing, 18 Oktober 2017)

3. Pendampingan.

Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat juga pendampingan bertujuan untuk memantau dan melihat perkembangan yang di lakukan masyarakat dalam proses pemberdayaan khususnya masyarakat yang ada di desa Komodo, seperti halnya yang di ungkapkan oleh salah seorang narasumber dari desa, berikut kutipan wawancaranya:

“Demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan dalam pemberdayaan, kami tak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat agar kiranya melaporkan jika mengalami kesulitan apa saja yang berkaitan dengan pemberdayaan ini, agar sekiranya dapat kami bimbing” (Ahyar, 18 Oktober 2017)

Selain itu juga pendampingan disini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menunjang pemberdayaan itu sendiri, adanya bantuan pembangunan prasarana usaha untuk mendorong masyarakat berdaya, maka perlu ada sebuah bantuan untuk pembangunan prasarana. Prasarana di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong mereka menggali potensi yang dimilikinya dan mempermudah meka melakukan aktifitasnya,

dan bantuan pendampingan. Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi, dan menjadi mediator untuk masyarakat.

Di desa Komodo ada beberapa spot atau lokasi destinasi yang ramai dikunjungi wisatawan dan di beberapa lokasi itu pula sudah disediakan tempat yang diperuntukan bagi masyarakat untuk menjual hasil kerajinannya diantaranya adalah Loh liang, Loh buaya, pantai Pink, dan pulau Padar, hal ini bertujuan agar masyarakat tidak menjajakan hasil kerajinannya ke lokasi-lokasi yang dianggap privat, yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan para wisatawan, seperti yang diungkapkan oleh kepala desa Komodo. Berikut kutipan wawancaranya:

“Selain memberikan pengarahan dan pendampingan kepada masyarakat terkait pemberdayaan ini, kami juga sudah menyediakan lahan khusus (lapak) untuk di jadikan sebagai tempat menjajakan hasil kerajinannya, agar masyarakat tidak berjualan di sembarang tempat juga kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang datang berkunjung” (H. Aksan, 18 Oktober 2017)

Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa narasumber yang merasa sangat terbantu berkat adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, berikut kutipan wawancaranya:

“Dengan adanya tempat penjualan ini, saya merasa sangat terbantu karna sebelumnya saya hanya berkeliling sejak pagi hari dari tempat satu ke tempat yang lain hanya untuk menjajakan patung komodo, nanti pulanginya sebelum magrib, sedangkan ditempat ini, kami cukup menunggu dan bisa sambil istirahat siang atau sambil mengerjakan pekerjaan lainnya” (Bpk. Kamal, 18 Oktober 2017)

“Alhamdulillah sangat merasa terbantu, karna adanya fasilitas ini, kami tidak perlu lagi berkeliling tempat mencari wisatawan, apalagi wisatawan kadang risih kalau kita mengikuti mereka dengan sedikit paksaan, karna kalau tidak begitu, mereka juga kadang tidak mau membeli. Selain itu juga dengan adanya tempat ini, saya bisa sambil bergantian dengan anak untuk menjaga jualan ini, kalau misalnya saya punya keperluan lain dirumah. (Fatiyah, 18 Oktober 2017)

Bahkan ada pula beberapa warga yang sudah cukup paham dengan dunia internet biasanya memasarkan kerajinannya melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram.

Seperti pernyataan salah seorang pengrajin yang menjajakan kerajinannya melalui media sosial, berikut kutipan wawancara peneliti dengan narasumber:

“Selain berjualan disini, saya juga menjualnya melalui media sosial milik saya. awalnya media sosial saya pakai untuk pribadi saja, tapi saya liat banyak juga orang berjualan barang dagangannya di facebook, makanya saya coba, ternyata banyak yang pesan” (Narti, 20 Oktober, 2017)

Adanya inisiatif dari pemerintah setempat untuk mendorong penduduk setempat bekerja disektor pariwisata juga hadirnya sistem zonasi tampaknya menjadi alasan yang mempercepat terjadinya peralihan pekerjaan masyarakat di desa Komodo.

Upaya pemerintah desa Komodo dalam melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di sektor pariwisata melalui pemberdayaan merupakan langkah yang tepat, sebab melalui pemberdayaan ini selain dapat menumbukan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong, secara ekonomi masyarakat juga terbantu, pun demikian juga dengan pemerintah itu sendiri, hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara diatas dengan mayoritas masyarakat merespon dengan baik program pemberdayaan ini.

Bagi pemerintah proses pemberdayaan ini tentunya tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apa bila masyarakat sendiri tidak kooperatif dan terbuka untuk menerima semua arahan dalam proses pemberdayaan ini, demikian juga dengan masyarakat, hadirnya pemberdayaan masyarakat di desa Komodo, merupakan harapan baru untuk melangsungkan hidup, meskipun ada beberapa tahapan yang mesti dilalui oleh masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan proses pemberdayaan ini seperti proses pelatihan dan arahan yang diberikan meskipun memakan waktu cukup lama, dan ketekunan serta keuletan.

e. Partisipasi Masyarakat Pulau Komodo dalam Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil atau tidaknya terlihat dari bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam prosesnya. Dengan melihat bagaimana partisipasi

masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat, nantinya akan diketahui bagaimana kondisi masyarakat tersebut dan seperti apa pola pikir masyarakat, ketika sikap partisipasi di masyarakat sudah terbangun maka terlihatlah perkembangan pemikiran masyarakat akan sadarnya dengan kondisi mereka. Partisipasi adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta dalam proses pengidentifikasian masalah dan bagaimana cara menanganinya, dan langkah apa yang harus diambil untuk menghadapi masalah tersebut.

Partisipasi bukan hanya sekedar keikutsertaan dalam bekerja akan tetapi partisipasi adalah bagaimana individu atau kelompok masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap kondisi sekitar menganggap hal tersebut sebagai hal yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama sebab pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Maka pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari segenap elemen masyarakat.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat di pulau Komodo dalam proses pemberdayaan ini mulanya memang cukup rendah, artinya minat masyarakat pulau Komodo terhadap pemberdayaan ini masih minim, hal ini juga sudah di tegaskan sebelumnya melalui tabel 1.4, bahwasannya masyarakat baru mulai terlibat langsung dalam proses pemberdayaan ini jauh sebelum awal di bentuknya pemberdayaan ini, artinya beberapa tahun setelah berjalannya pemberdayaan ini masyarakat baru mulai terlibat dan ikut berpartisipasi, hal ini di latarbelakangi adanya desakan akan kebutuhan hidup masyarakat desa komodo yang menurut pendapat beberapa warga bahwa mereka merasa terisolasi dengan adanya zonasi di TNK, maka tidak ada pilihan lain selain mengikuti keinginan pemerintah dalam mendorong masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pemberdayaan ini. Sementara disisi lain pemerintah daerah sendiri merasa tidak berdaya soal zonasi TNK sebab mereka mengklaim

bahwa kebijakan itu bukan keputusan dari pemerintah daerah, melainkan dari pusat, hal ini pula lah yang menyebabkan terjadinya gesekan antara masyarakat dengan pemerintah yang berkepanjangan sehingga perihal partisipasi masyarakat pulau Komodo dalam proses pemberdayaan ini terkesan lambat. Terlepas dari adanya gesekan antara masyarakat desa Komodo dan pemerintah faktanya bahwa hari ini terjadi perubahan besar pola mata pencaharian masyarakat desa Komodo dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, dari yang awalnya mayoritas sebagai nelayan dan petani rumput laut kemudian beralih profesi menjadi pematung dan berdagang baju bergambar komodo atau souvenir hasil karya mereka sendiri melalui pemberdayaan tadi, dan dari sini pula dapat dilihat bagaimana partisipasi masyarakat desa Komodo dalam proses pemberdayaan ini.

Bentuk dari partisipasi masyarakat desa Komodo terhadap keberlangsungan pemberdayaan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu:

1. Partisipasi dalam aspek pelatihan.

Partisipasi masyarakat desa Komodo dalam aspek pelatihan yang di maksud disini yaitu bahwa masyarakat terlibat langsung dalam proses pelatihan pemberdayaan ini, indikator untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ini yaitu tingginya tingkat kehadiran masyarakat, penyampaian pendapat dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dari indikator kehadiran hampir 80 persen masyarakat terlibat dalam proses kegiatan pemberdayaan, dan masyarakat yang terlibat kemudian dilatih dan diajak bekerja sama untuk menghasilkan produk kerajinan tangan yang punya nilai jual lebih kepada wisatawan, bentuk partisipasi dan kerja sama ini menekankan akan pentingnya inovasi dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat di ajak merumuskan ide dan gagasan demi menciptakan produk-produk yang baru dan inovatif. Seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang narasumber yang peneliti wawancarai, berikut kutipan wawancaranya:

“Disetiap proses pelatihan, kami diajak berdiskusi terlebih dahulu mengenai produk kerajinan tangan yang akan dihasilkan, tujuannya agar produk kerajinan tangan ini mengalami perubahan baik dari segi bentuk, warna atau model yang akan kita lempar ke pasaran nantinya, sementara produk kami yang ada di pasaran saat ini bentuk dan modelnya hampr bisa dikatakan sama semua, nah itu yang coba untuk kita hindari sehingga masyarakat di tuntut untuk lebih terbuka dalam memberikan ide dan gagasannya”(Taswin, 20 Oktober 2017)

Upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pemberdayaan ini membutuhkan langkah yang panjang, selain adanya sosialisasi dari pemerintah itu sendiri juga di dorong oleh adanya realitas sosial yang lain khususnya bagi masyarakat yang sudah lebih dulu ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan ini yaitu adanya peningkatan ekonomi yang terlihat, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat dalam rangkaian proses pemberdayaan ini merasa terdorong untuk ikut serta berpartisipasi.

2. Partisipasi dalam aspek pendampingan.

Dalam proses pemberdayaan ini tentunya perlu adanya pendampingan bagi masyarakat yang di berdayakan, biasanya pendampingan ini dilakukan oleh orang yang memberdayakan kepada orang yang di berdayakan, namun yang terjadi di desa Komodo dalam proses pemberdayaan ini, masyarakat itu sendiri juga bisa terlibat langsung mendampingi atau memberikan arahan kepada masyarakat lainnya yang baru terlibat dalam pemberdayaan ini. indikator dari partisipasi pendampingan ini yaitu bahwa adanya transformasi skill dan kemampuan dalam membuat patung, souvenir atau baju komodo. Salah satunya adalah narasumber yang peneliti wawancarai, berikut kutipan wawancaranya.

“sejak awal saya sudah ikuti ini pemberdayaan sampai sekarang, sudah tidak terhitung lagi berapa patung komodo yang sudah saya hasilkan, dan dari pengalaman ini juga saya banyak di panggil oleh tetangga-tetangga yang juga mau atau baru ingin mulai mematumg, untuk mengajari mereka atau mendampingi mereka dalam pembuatan

patung komodo ini untuk mendapatkan hasil yang baik, karna mereka tidak punya pengalaman soal membuat patung, jadi mesti di damping” (Arfin, 20 Oktober 2017)

Partisipasi masyarakat dalam pendampingan, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang sudah teruji yang dapat di lihat dari kualitas hasil olahan tangan, sehingga partisipasi seperti ini diharapkan dapat menjamur ke setiap masyarakat yang ada di desa Komodo yang sampai saat ini belum tersentuh oleh pemberdayaan.

3. Partisipasi dalam aspek Bantuan modal (Swadaya)

Selain karna adanya keterdesakan akan pemenuhan kebutuhan hidup, partisipasi masyarakat juga di dorong oleh adanya swadaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang terlebih dahulu sudah di berdayakan, bantuan modal atau swadaya masyarakat ini diberikan kepada masyarakat yang ingin terlibat langsung dalam pemberdayaan, swadaya masyarakat ini merupakan pemanfaatan hasil dari kegiatan pemberdayaan yang tengah berlangsung saat ini. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala desa Komodo selaku narasumber, berikut kutipan wawancaranya:

“Karna ketersediaan anggaran desa juga terbatas, jadi mekanisme yang kami jalankan saat ini adalah bantuan berupa swadaya yang berasal dari masyarakat itu sendiri, artinya ada pembagian hasil kegiatan kerajinan yang kemudian di swadayakan kepada masyarakat yang baru ingin mulai terlibat dalam pemberdayaan ini, karna ada begitu banyak masyarakat yang diberdayakan sementara pemerintah desa tentunya tidak mampu untuk memberikan bantuan modal kepada semua masyarakat yang akan di berdayakan, adapun besaran bantuan modal yang diberikan tergantung dari jenis kerajinan yang di geluti, bagi pematung komodo biasanya, tiga ratusan riibu, sementara untuk pembuat baju bergambar Komodo berkisar lima ratusan ribu” (H. Aksan, 22 Oktober 2017)

Partisipasi masyarakat desa Komodo dalam proses pemberdayaan ini terlihat cukup mengalami perubahan, perubahan yang dimaksud disini yaitu mayoritas masyarakat yang berprofesi nelayan yang semenjak hadirnya TNK beserta zonasinya mengalami kesulitan dalam hal akses mereka terhadap laut untuk menangkap ikan, sehingga memaksa mereka untuk berhenti melaut, disisi yang lain pemerintah seolah memberikan harapan baru bagi

mereka yang kehilangan mata pencaharian, namun karna terjadi gesekan antara masyarakat dan pemerintah sehingga mereka enggan untuk diberdayakan dan lebih memilih melut dengan jarak yang bermil-mil, namun dengan anggaran yang mesti di keluarkan juga cukup besar. Sehingga aktifitas mealut ini lama kelamaan juga berhenti dengan sendirinya. Pemerintah melalui program pemberdayaan ini kembali mesosialisasikan, berupaya menarik lebih banyak lagi masyarakat yang mau di berdayakan dengan alasan bahwa desa Komodo kini menjadi primadona bagi wisatawan dan ini akan di manfaatkan sebagai sumber ekonomi yang baru tentunya melalui tahap pemberdayaan, sehingga belakangan gelombang peserta yang mau terlibat dalam pemberdayaan ini mengalami peningkatan, bahkan di tahun 2017 yang lalu, terhitung sudah 251 orang yang di berdayakan.

f. Dampak Pemberdayaan Masyarakat desa Komodo

Masyarakat Indonesia telah semakin mampu menentukan sendiri prioritas-prioritas pembangunan setempat, sementara Pemerintah Indonesia dan sejumlah lembaga melaksanakan program dengan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, salah satu contohnya adalah program pemberdayaan yang ada di desa Komodo sebuah program Pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan, memperkuat pemerintah daerah maupun institusi masyarakat, serta memperbaiki tata kelola setempat

Selain membangun dan mengembangkan potensi wilayah Desa Komodo dampak pemberdayaan masyarakat melalui usaha kerajinan tangan Patung Komodo dan sovenir juga merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Indikator dalam merubah pola pikir tersebut masyarakat mampu mengorganisasi dirinya sendiri dan kemandirian dalam bidang ekonomi dari masing-masing individu. Selain itu juga masyarakat sadar akan pentingnya perubahan pada lingkungan yaitu dengan kerjasama meraih sebagai Desa Komodo sebagai Desa sentra kerajinan seni mengukir dan membetuk. Seperti yang di ungkapkan kepala desa Komodo, berikut kutipan wawancaranya:

“Selain sebagai desa wisata, desa Komodo juga kini menjadi desa sentra kerajinan seni tangan, dan ini adalah apresiasi pemerintah daerah untuk terus mendukung program yang kami tengah jalankan” (H. Aksan, 20 Oktober 2017)

Usaha kerajinan tangan patung Komodo di desa Komodo Kabupaten Manggarai Barat merupakan sebuah usaha kecil menengah yang memberikan banyak manfaat khususnya di Desa Komodo. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya usaha kerajinan tangan patung Komodo berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan sebagai berikut: a.) Menambah pendapatan ekonomi keluarga. b.) Menambah ilmu pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dalam bidang seni keterampilan.

Setelah mengikuti kerajinan tangan patung Komodo baik dari pengelola maupun pengrajin kerajinan tangan patung Komodo merasakan manfaatnya yaitu perubahan dalam peningkatan ekonomi, awalnya para pengrajin rata-rata berprofesi sebagai nelayan, mereka hanya mengandalkan hasil laut yang tidak menentu, belum lagi adanya pembatasan zona Taman Nasional Komodo yang membatasi aktifitas nelayan untuk melaut. Dengan adanya kerajinan tangan patung Komodo, souvenir memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat Desa Komodo dalam peningkatan ekonomi. Indikator keberhasilan dalam peningkatan ekonomi dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan tangan patung Komodo cukup membantu mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah bagi anak mereka.

seperti yang di ungkapkan oleh beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, berikut kutipan wawancaranya:

“Alhamdulillah kegiatan pemberdayaan ini sangat membantu khususnya bagi warga seperti saya yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari” (Jamal, 20 Oktober 2017)

“perputaran uang dalam usaha jual patung, souvenir dan baju komodo ini cepat, ketimbang menagkap ikan meskipun nanti waktu hasil laut melimpah, tapi susah untuk melaut apa lagi jarak tempu menuju pasar cukup jauh memakan waktu sampai 5 jam”. (Saweda, 23 oktober 2017)

Lagi menurut salah seorang narasumber yang peneliti wawancarai berikut kutipan wawancaranya :

“Alhamdulillah, anak saya ada yang sudah kuliah biyaya dari hasil kerajinan patung komodo ini.” (Basir, 23 oktober 2017).

“hasil jual patung ini lumayan, selain bisa cukup untuk belanja sehari-hari, saya juga sudah punya tabungan sendiri” (Usril, 23 oktober, 2017)

Pemberdayaan pada dasarnya hadir dengan tujuan agar masyarakat menjadi berdaya, baik itu berdaya secara ekonomi maupun sosial, dari beberapa kutipan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di desa Komodo berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan dampak ekonomi dari pemberdayaan itu sendiri, dan selain dampak ekonomi, masyarakat juga merasakan adanya dampak sosial yang dirasakan yaitu dari pemberdayaan masyarakat yang turut berpartisipasi pada kerajinan tangan ini menjadi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan mereka menjadi aktif dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya sehingga menciptakan solidaritas diantara anggota masyarakat. Indikator keberhasilan pada dampak sosial ini adalah mereka berkomunikasi kepada anggota masyarakat lainnya sehingga dengan cara berdialog mereka secara alamiah dan didasari dengan penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial yang nyata. Dampak dari pemberdayaan masyarakat melalui usaha kerajinan patung Komodo yaitu melestarikan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia yaitu gotong royong dan kerjasama terutama dalam menjaga dan merawat kelestarian lingkungan. Selain itu dampak dari pemberdayaan masyarakat ini adalah dengan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbahan dasar kayu klumpang sehingga kerajinan tangan ini tidak hanya dikenal dalam negeri tetapi bisa sampai mancanegara. Sehingga indikator pada pemberdayaan masyarakat ini berdampak pada kebudayaan yang ada di masyarakat yaitu masyarakat turut berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan lokal dengan gotong royong dan kerja sama dalam organisasi

kemasyarakatan dan menciptakan dan mendesain produk-produk baru sehingga turut melestarikan kerajinan tangan tradisional.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang narasumber dari BTNK bahwa:

“Selain memberikan penghasilan yang baik, kerajinan tangan ini juga memberikan manfaat yang lain, yaitu Komodo dan patung Komodo menjadi identitas kita, yang harus kita lestarikan selain itu juga semenjak adanya pemberdayaan ini, masyarakat lebih mudah untuk saling membantu, dan semakin mengurangi diskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah” (Rasid, 24 Oktober 2017)

Dalam upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan sumber daya alam tidak hanya sebatas teori melainkan memberdayakan masyarakat agar menjadi kreatif dan terampil untuk kecakapan hidupnya. Maksud dari kreatif dan terampil disini adalah dalam mendesain pola, sehingga nantinya bisa menghasilkan barang produksi yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk lainnya. Maka dari itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang mengikuti kerajinan tangan patung komodo ini yaitu menjadi berkembang dalam segi kreatif dan terampil dalam menciptakan produk sehingga barang kerajinan bernilai jual dan ramah lingkungan dengan mengedepankan produk lokal. Indikator dalam meningkatkan produktivitas ini adalah masyarakat yang terlibat langsung pada kerajinan tangan patung Komodo dan sovenir menjadi kreatif yaitu mampu menciptakan dan mendesain pola dengan kreasi mereka. Sehingga ide kreatif mereka berkembang tanpa plagiat dengan kelompok kerajinan tangan yang lainnya.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui usaha kerajinan tangan ini mampu merubah pola pikir mereka untuk biaya sekolah anak atau cucunya sampai ke jenjang yang lebih tinggi tujuannya agar bisa merubah status sosial. Dengan tuntutan ingin menyekolahkan anaknya masyarakat yang mengikuti kerajinan tangan ini banyak yang termotivasi dan selalu diberi dukungan oleh Pemerintah setempat. Hal ini di dukung oleh pernyataan salah sorang narasumber bahwa:

“saya sudah satu tahun berada di Mataram untuk melanjutkan studi, kebetulan lagi pulang kampung dan bantu-bantu orang tua untuk berjualan patung” Heci, 27 Oktober 2017).

Sesuai hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dari pemberdayaan masyarakat melalui usaha kerajinan tangan patung Komodo ini memberikan manfaat baik untuk masyarakat atau lingkungan Desa Komodo. Dengan menjaga kelestarian alam dengan menggunakan bahan alam dengan menjunjung tinggi nilai lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan kerajinan tangan ini dapat membantu menangani masalah pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Komodo. Manfaat dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui usaha kerajinan tangan ini memberikan manfaat terutama dalam hal pendapatan ekonomi.

g. Faktor pendukung dan Penghambat Pemberdayaan

Dalam perspektif pekerjaan sosial, pengertian pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri seseorang agar ia dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara wajar tanpa dihalangi oleh kesenjangan terhadap lingkungannya, dalam menjalankan suatu usaha tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yang menunjang agar kegiatan bisa terlaksana.

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Pengertian terpadu tidak berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Pemberdayaan bukanlah program

yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas.

Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial, pun demikian adanya yang terjadi di desa Komodo dalam melaksanakan program pemberdayaan ini ada banyak hal yang kemudian menjadi problem terhambatnya kegiatan pemberdayaan dan juga yang menjadi faktor pendukung.

Faktor pendukung kerajinan tangan patung Komodo ini berasal dari semua potensi yang ada di Desa Komodo. Dengan adanya potensi baik potensi alam maupun potensi masyarakat sehingga mendukung dan di tingkatkan agar mampu menunjang kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat Desa Komodo. Khususnya dari masyarakat itu sendiri yang mau membuka diri dengan pemerintah agar ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, yang meskipun pada awalnya ada sedikit gesekan antara pemerintah dengan masyarakat dikarenakan adanya zonasi dan larangan untuk melaut. Seperti yang diungkapkan oleh kepala desa Komodo bahwa “

“dulunya masyarakat enggan membuka diri dengan kami, karna mungkin mereka pikir kami (pemerintah) di desa atau Kabupaten yang punya keputusan Zonasi itu., bahkan ada yang terang-terangan menolak untuk ikut pelatihan pemberdayaan, tapi Alhamdulillah dua tahun belakangan ini masyarakat sudah mulai mau membuka diri, ini bisa di lihat dari jumlah keanggotaan kita yang di berdayakan” (H. Aksan, 03 November 2017)

Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering muncul adalah sulitnya untuk mensinergikan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu, dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergikan, pengertian terpadu tidak berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi.

Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas.

Adapun faktor penghambat dalam proses pemberdayaan ini yaitu Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, hal dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat. Selain itu sifat ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses pemandirian masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lama. Seperti yang di ungkapkan salah seorang narasumber dari internal desa Komodo, berikut kutipan wawancaranya.

“pembuatan patung komodo atau souvenir biasanya menggunakan bahan dasar kayu kelumpang yang di ambil di sekitar wilayah taman nasional Komodo, untuk mendapatkan bahan dasar ini tidak serta merta mudah untuk dilakukan, sementara masyarakat berharap pemerintah desa menyediakan bahan untuk mereka” (Ahyar, 03 November 2017)

Lagi menurut salah seorang narasumber dari BTNK ada banyak prosedur yang harus di lakukan yaitu dengan cara melapor ke pos penjagaan atau balai desa terlebih dahulu, berikut kutipan wawancaranya.

“Setelah melapor, warga harus mengikuti syarat yang di berlakukan oleh kami (Pemerintah) salah satunya warga dilarang membawa senjata tajam berupa golok, parang atau sejenisnya, mereka hanya boleh mengambil kayu yang sudah mati atau kayu yang sudah jatuh dari pohonnya”. (Rasid, 04 November 2017)

Sementara dari faktor internal yang merupakan faktor penghambat terhadap pengembangan organisasi pemerintah khususnya di desa karena SDMnya kurang terampil seperti halnya penjelasan mengenai aspek sumber daya manusia. Sebagaimana terlihat sumber daya manusia atau aparat yang bertugas pada organisasi kantor tersebut secara kuantitas jumlah pegawai yang ada pada kantor Desa masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban tugas yang ada. Sebagaimana terlihat tugas ini tidak hanya menangani masalah pengawasan, pembinaan atau kegiatan administrasi saja tetapi segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan desa, seperti tugas penataan pertamanan, kebersihan desa, keindahan desa dan lain-lain. Selain aspek dalam organisasi tersebut yang menjadi penghambat dalam organisasi pemerintah desa adalah kualitas sumber daya manusia yang sangat menentukan.

Kualitas aparat yang ditugaskan pada badan pengelolaan organisasi tersebut dari segi kemampuan kerja masih terlihat kurang. Seperti yang di ungkapkan oleh kepala desa komodo dalam wawancanya bersama peneliti.

“untuk tenaga dengan keahlian tertentu kami masih kurang, pemberdayaan ini saja kami di bantu oleh BTNK dan ntuk mengadakan pelatihan pembuatan baju komodo saja kami panggil orang dari kota” (Haji Aksan, 04 November 2017).

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap

pemberdayaan masyarakat. Sebab pemberdayaan merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, dan hal ini hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Faktor penghambat dan pendukung yang menyertai proses kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Komodo tentunya tidak luput dari pengaruh internal maupun eksternal yang ada di dalam pemerintah selaku yang memberdayakan dan masyarakat itu sendiri yang menjadi obyek pemberdayaan, seperti yang kemudian sudah kita bahas di atas terkait beberapa faktor pendukung dan penghambat itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pemberdayaan masyarakat pulau Komodo pasca pembatasan zona wilayah perairan taman nasional Komodo” yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dapat penulis simpulkan sebagai berikut.

1. Proses pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo berlangsung dengan cara masyarakat di berikan pelatihan, pendampingan dan modal dalam pembuatan patung komodo, souvenir maupun baju komodo, yang di lakukan oleh Balai taman nasional Komodo bekerja sama dengan pemerintah Desa Komodo dan masyarakat itu sendiri. Melalui pelatihan pembuatan kerajinan ini masyarakat desa Komodo mampu meningkatkan perekonomian mereka sendiri.
2. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh BTNK dan Balai Desa Komodo yaitu masyarakat berpartisipasi dalam meyarakan pendapat, ide dan gagasan demi pemberdayaan yang interaktif dan inovatif, masyarakat juga berpartisipasi penuh dalam sumbangsi pengetahuan tentang kerajinan tangan (Transformasiskil) dan swadaya bagi masyarakat lainnya melalui pembagian hasil dari kerajinan tangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pemberdayaan masyarakat pulau Komodo pasca pembatasan zona wilayah perairan taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, agar kedepannya bias menjadi lebih baik dan semakin meningkat:

1. Bagi Pemerintah setempat hendaknya lebih mengorganisir dengan lebih baik lagi agar dapat meningkatkan manajemen organisasi. Tetap menjaga kualitas dan kuantitas barang produksi sehingga tidak akan memberikan rasa kecewa kepada konsumen. Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama pengrajin.
2. Bagi kerajinan patung Komodo sebaiknya meningkatkan kerjasama baik dengan masyarakat maupun mitra kerja agar barang produksi bisa lebih dikenal dengan memperkenalkan produk lokal kemancanegara.
3. Sumberdaya insani juga lebih ditingkatkan lagi untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sehingga dapat memunculkan manusia yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda hingga pada akhirnya akan terwujud sumberdaya insane berkualitas yaitu memiliki pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemauan untuk bekerja secara efektif
4. Privatisasi zona di kawasan Taman Nasional Komodo kurang menguntungkan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat lambat meningkat.

DaftarPustaka

Buku :

- Anwar.2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung :Alfabeta
- Arnaz, Mehta. 2004. *Panduan Sejarah Ekologi Taman Nasional Komodo*. Bali: The Nature Conservancy Indonesian Coastal andMarine Program.
- Asmin, F. 2004. *Perencanaan Pengembangan Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat*. Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Begen, D.G. 2002. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Perinsip Pengelolaannya*. Sinopsis Pusat Kajian dan Sumberdaya Pesisir dan Lautan.IPB.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hidjaz, Kamal.2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Labolo, Muhdam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeliono, M., Limberg, G., Minnigh, P., Mulyana, A., Indriatmoko, Y., Utomo,N.A.,Saparuddin, Hamzah, Iwan, R. danPurwanto, E. 2010.*Meretas kebuntuan: konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Terjemahan Matheos Nalle, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rianto, Bambang. 2005. *Dasar dasar Pembelajaran Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta : YBPFE UGM.
- Sutoro, Eko, 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan kebijakan Sosial*. Bandung. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Retika Aditama.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syani, Abdul. 2012. *Sosiologi sistematika teori dan Terapan*. Jakarta: Budi Aksara.

Mardijono. 2008. *Persepi dan Partisipasi Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota Batam*. (Tesis) Universitas Diponegoro Semarang.

Zunadi, Usman.Suyoto. 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal :

Andini, Uly Hikmah. Soeaidy, Saleh, Mochamad. Hayat Ainul. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal. Studi Kasus di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 12.

Ali, Solihin. Idris Muhammad, Parawangi Anwar. 2014. *Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Gowa Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol IV. No 1. April 2014.

Kurniawati, Pratiwi, Dwi. Supriyono, Bambang. Hanafi, Imam. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi*. Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojikerto. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1. No 4.

Labaran. Hakim Lukman. Hardi Rudi. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju*. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol IV. No 1. April 2014

Martmono. Mapamiring. Malik Ihyani. 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Usaha Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) di*

Desa Kolai Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol, III. No 2. Oktober 2013.

Mulyono, Purwohadi. 2013. *Bentukbentuk Penerpan Norma Hukum Adaat dalam Kehidupan Masyarakat di Jawa Tengah*. Jurnal Media Hukum. Vol 20. No2. 2013

Rahmanto, Derta. Purwaningsih Endang. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untungjawa Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan*. Jurnal Fakultas Hukum YASRI. Vol, 7. No 1

Rahmawati, ddk. 2008. *Pengetahuan local masyarakat adat Kasepuhan: adaptasi konflik dan dinamika sosio-ekologis*. *Sodality: Jurnal Trans disiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*2(2):191 190.

Website dan Dokumen :

Muhammad. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat*. <http://www.rumahzakat.org>. Diakses31 oktober 2016.

Li, TM. 2001. *Masyarakat adat*, [.http://dx.doi.org/10.1017/S0026749X01003067](http://dx.doi.org/10.1017/S0026749X01003067), Di Akses 09 desember 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Komodo, Di Akses pada tanggal.29 Juli2017.

<httpmaxmaswekan.blogspot.sg/2012/02/sosiologikepulauan.html>. Di Akses pada tanggal 07 Juli 2017.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pulau>, Di Aksespadatanggal 06 Juli 2017.

https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi_20091015151035_2384_0.pdf. Di Akses pada tanggal 10 Juli 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 28 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 56/Menhut-II/2006.Tentang Pedoman ZonaTaman Nasional.

Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 2014. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27. Tahun 2007, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

nomor : 1377/FSP/A.1-VIII/X/1439 H/2017 M
jumlah : 1 (satu) Eksamplar
sifat : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Irfan
Stambuk : 105640119211
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kabupaten Manggarai Barat.

Judul Skripsi : ***"Pemberdayaan Masyarakat Pulau Komodo Pasca Pembatasan Zona Wilayah Perairan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 Oktober 2017



Dekan,
U. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
Bantu Dekan I

NBM. 1084 366



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

or : 2246/Azn-5/C.4-VIII/X/37/2017

: 1 (satu) Rangkap Proposal
: Permohonan Izin Penelitian

15 Muharram 1439 H
05 October 2017 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Manggarai Barat

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -

Manggarai Barat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1377/FSP/A.1-VIII/X/1439/2017 tanggal 3 Oktober 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **IRFAN**
No. Stambuk : **10564 01192 11**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pemberdayaan Masyarakat Pulau Komodo Pasca Pembayaran Zona Wilayah Perairan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Oktober 2017 s/d 7 Desember 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Frans Nala-Labuan Bajo-Flores-NTT Telp/Fax : 0385-41

SURAT KETERANGAN/ REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: Kesbang . 070 / 212 / X / 2017

Menunjuk Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor : 246/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2017, tanggal 05 Oktober 2017, Perihal: Permohonan Izin Penelitian dan setelah mempelajari rencana penelitian/ proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan / Rekomendasi kepada :

Nama : IRFAN
NIM : 105640119211
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Universitas / PT : Muhammadiyah Makassar

Untuk melakukan kegiatan penelitian/ pengumpulan data dengan judul:

“ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PULAU KOMODO PASCA PEMBATASAN ZONA WILAYAH PERAIRAN TAMAN NASIONAL KOMODO DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT ”.

Waktunya : 2 (Dua) Bulan sejak dikeluarkannya surat ini
Lokasi : Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat
Menanggung Jawab : Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hal – hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti:

Wajib memberitahukan maksud dan tujuan kepada Instansi Pemerintah/ Swasta yang diteliti.

Selama melakukan penelitian tidak diijinkan melakukan penelitian dibidang lain yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Harus mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

Wajib melaporkan hasil penelitian beserta surat pengantar dari Instansi/ Tempat melakukan penelitian sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat/ Rekomendasi selesai penelitian kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Barat.

Ijin penelitian ini akan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pihak peneliti melanggar ketentuan tersebut di atas.

Kepada para pihak yang mendapat tembusan surat ini agar memberikan bantuan untuk kelancaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan/ Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 12 Oktober 2017



Tembusan : Dh. disampaikan kepada:



IRFAN, Dilahirkan di kabupaten Manggarai Barat tepatnya di pulau Seraya Kecil, kelurahan Labuan Bajo, kecamatan Komodo, NTT, pada tanggal 09 Desember 1991. Anak ke dua dari lima bersaudara pasangan dari H. Santuo dan Almarhumah Hj. Sariamang. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar SDN 1 Komodo di kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2005, di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama SMPN 3 Sape kecamatan Sape kabupaten Bima dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan kembali pendidikan di sekolah menengah kejuruan SMKN 1 Bima di Kota Bima provinsi NTB pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2011 peneliti kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan, dan selesai pada tahun 2018, dengan judul penelitian ***“Pemberdayaan Masyarakat Pulau Komodo pasca Pembatasan zona Wilayah Perairan Taman Nasional Komodo”***